



Program Studi

**Bahasa dan
Kebudayaan Inggris (S1)**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

PEDOMAN PKM

**Program Studi
Bahasa dan Kebudayaan Inggris**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Tompotika Luwuk



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara Jalan Dewi Sartika No. 67 Luwuk Kode Pos 94715

Telepon (0461) 324027 <http://www.untika.ac.id>

Banggai – Sulawesi Tengah

SURAT - KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN 2023

NOMOR :101/T.03/HK.00.03/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) BERBASIS HILIRISASI RISET
PADA PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS
TAHUN 2023

DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Budaya Mutu dan penjaminan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang akuntabel di lingkungan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris;

b. Bahwa untuk mendukung Diferensiasi Misi Program Studi yang berfokus pada bidang Penelitian dan pengembangan wilayah pesisir serta laut, diperlukan panduan operasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terstruktur;

c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

3. Statuta Universitas Tompotika Luwuk;

4. Rencana Strategis (Renstra) FKIP Universitas Tompotika Luwuk 2022-2025;

5. Dokumen Kurikulum Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Tahun 2023.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara Jalan Dewi Sartika No. 67 Luwuk Kode Pos 94715

Telepon (0461) 324027 <http://www.untika.ac.id>

Banggai – Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Dokumen Pedoman Pelaksanaan PkM Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai acuan tunggal bagi dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan pengabdian.

Kedua : Setiap kegiatan PkM di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris wajib mengedepankan prinsip hilirisasi riset, di mana tema pengabdian harus memiliki keterkaitan dengan peta jalan (roadmap) penelitian wilayah pesisir dan laut.

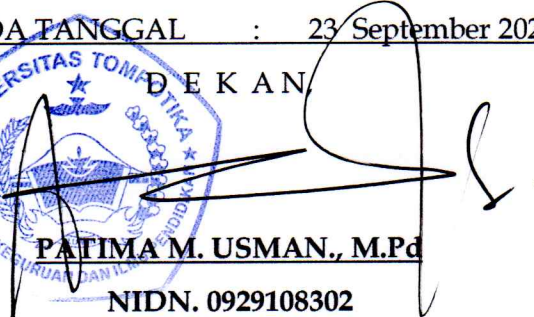
Ketiga : Mewajibkan pelibatan mahasiswa dalam setiap judul PkM sebagai bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Program Studi/Fakultas atau sumber pendanaan lain yang sah.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : L U W U K

PADA TANGGAL : 23 September 2023

DEKAN

PATIMA M. USMAN., M.Pd
NIDN. 0929108302

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
2. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan FKIP Untika Luwuk.
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Tompotika Luwuk dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan pedoman ini memiliki urgensi yang sangat strategis, terutama menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai program studi yang memiliki Diferensiasi Misi pada bidang Penelitian, Program Studi BKI berkomitmen untuk menjadikan PkM bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan instrumen hilirisasi riset terapan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Wilayah Pesisir dan Laut.

Pedoman ini dirancang untuk memberikan standar operasional yang jelas bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Di dalamnya termuat arah kebijakan pengabdian yang berbasis pada kearifan lokal Kabupaten Banggai, prosedur pengusulan yang transparan, hingga mekanisme rekognisi MBKM bagi mahasiswa..

Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan universitas, fakultas, tim penyusun, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penerbitan pedoman ini. Semoga dokumen ini menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris sebagai pusat rujukan literasi dan

Luwuk, 23 September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang: PkM sebagai Hilirisasi Keilmuan	1
1.2. Tujuan Pedoman Pelaksanaan PkM	3
1.3. Ruang Lingkup Pengabdian Berbasis Pesisir	5
BAB II STANDAR DAN KETENTUAN UMUM (PENETAPAN)	6
2.1. Kualifikasi Pelaksana: Sinergi Kepakaran Dosen dan Mahasiswa	6
2.2. Relevansi Tema: Integrasi Penelitian dan Kearifan Lokal	9
2.3. Pendanaan: Diversifikasi Sumber Daya dan Akuntabilitas	12
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN (PELAKSANAAN)	16
3.1. Tahap Pengusulan (Submission) dan Seleksi Mutu	16
3.2. Tahap Pelaksanaan Lapangan: Experiential Learning di Pesisir	19
3.3. Tahap Diseminasi dan Luaran: HKI dan Publikasi Ilmiah	22
BAB IV KODE ETIK PENGABDIAN	26
4.1. Integritas Akademik dan Penghormatan Budaya Lokal	26
4.2. Etika Relasi Dosen-Mahasiswa dan Keselamatan Kerja (K3)	27
BAB V MONITORING DAN EVALUASI (EVALUASI)	29
5.1. Instrumen Evaluasi PkM Berbasis Dampak	29
5.2. Penilaian Kinerja: Rekognisi MBKM dan Capaian IKU	31
BAB VI PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN	35
6.1. Pengendalian: Mekanisme RTM dan Closing the Loop	35
6.2. Peningkatan: Strategi Menuju Akreditasi Unggul	38
BAB VII PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	43
Lampiran 1: Template Laporan Akhir PkM	43
Lampiran 2: Instrumen Survei Kepuasan Mitra (Indikator 34)	47
Lampiran 3: Rubrik Penilaian Kinerja Mahasiswa (MBKM)	48
Lampiran 4: Checklist Validasi Luaran (HKI & ISBN)	49
Lampiran 5: Format Logbook Harian Digital	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan manifestasi integratif dari tanggung jawab moral dan intelektual institusi pendidikan tinggi dalam merespons dinamika sosial. Sebagai pilar ketiga dalam Tridharma Perguruan Tinggi, PkM di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris (BKI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tompotika Luwuk tidak lagi dipandang sebagai aktivitas tambahan yang bersifat insidental. Sebaliknya, PkM diposisikan sebagai proses hilirisasi ilmu pengetahuan yang mentransformasikan teori-teori linguistik dan kebudayaan Inggris menjadi solusi praktis bagi problematika masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Implementasi PkM saat ini berpijak pada paradigma baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi ini menuntut perguruan tinggi untuk menggeser orientasi pengabdian dari sekadar pemenuhan beban kerja administratif menuju pencapaian dampak (impact-based) yang terukur dan tervalidasi. Program Studi BKI merespons tuntutan ini dengan menyusun sistem penjaminan mutu PkM yang berbasis pada siklus PPEPP, guna memastikan setiap aktivitas pengabdian memiliki landasan standar yang kuat dan berkelanjutan.

Fokus strategis Program Studi BKI terletak pada Diferensiasi Misi yang menitikberatkan pada bidang Penelitian. Kebijakan ini menciptakan sebuah ekosistem akademik yang unik, di mana PkM diwajibkan menjadi kepanjangan tangan dari temuan-temuan riset terapan (Research-led Community Service). Dengan filosofi ini, setiap program pengabdian yang diterjunkan ke masyarakat merupakan hasil dari kajian saintifik yang mendalam, sehingga intervensi yang diberikan kepada masyarakat memiliki akurasi metodologis dan objektivitas ilmiah yang tinggi.

Secara geografis dan sosiolinguistik, Program Studi BKI memiliki tanggung jawab besar terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Banggai dan sekitarnya yang didominasi oleh lanskap pesisir dan laut. Keberadaan kawasan industri berskala internasional seperti Donggi-Senoro LNG serta potensi pariwisata bahari yang melimpah menciptakan kebutuhan mendesak akan literasi bahasa Inggris yang spesifik. PkM hadir sebagai jembatan untuk menutup celah kompetensi komunikasi internasional bagi

masyarakat lokal, agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pembangunan ekonomi wilayahnya.

Selain aspek industrial, kekayaan kearifan lokal masyarakat pesisir Banggai, seperti ritual adat dan tradisi lisan, memiliki potensi besar untuk dipromosikan ke tingkat global melalui kemasan literasi Inggris yang tepat. Program Studi BKI memandang bahwa pelestarian budaya melalui PkM adalah bentuk Diplomasi Kebudayaan dari ruang kelas menuju panggung internasional. Melalui pendampingan bahasa dan digitalisasi konten budaya, PkM dosen dan mahasiswa berkontribusi dalam membangun arsip digital kebudayaan pesisir yang dapat diakses secara global, sekaligus memperkuat identitas nasional.

PkM di Program Studi BKI juga merupakan laboratorium hidup (living laboratory) bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan prinsip Experiential Learning di bawah payung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melalui keterlibatan aktif dalam tim PkM dosen, mahasiswa mendapatkan kesempatan langka untuk mengasah empati sosial, kepemimpinan, dan kemahiran komunikasi profesional di lapangan. Pengalaman ini secara evaluatif terbukti meningkatkan profil kompetensi lulusan, menjadikan mereka praktisi bahasa yang tidak hanya mahir secara teoretis, tetapi juga tangguh dalam memecahkan persoalan nyata di masyarakat.

Komitmen Program Studi BKI dalam menjaga standar mutu PkM telah dibuktikan dengan pencapaian luaran yang sangat produktif dalam tiga tahun terakhir. Keberhasilan menghasilkan 8 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan 14 buku referensi ber-ISBN yang bertema kearifan lokal pesisir merupakan bukti empiris bahwa manajemen PkM berjalan dengan sistematis. Rekognisi yang diterima dari Pemerintah Daerah serta adopsi produk PkM oleh mitra industri menjadi indikator kuat bahwa program studi ini telah berhasil membangun kepercayaan publik (public trust) melalui karya-karya pengabdian yang autentik.

Namun, Program Studi menyadari bahwa produktivitas yang tinggi harus dibarengi dengan standarisasi prosedur yang akuntabel guna menjamin integritas akademik. Risiko terjadinya malpraktik pengabdian, seperti fabrikasi data lapangan atau pengabdian yang tidak relevan dengan kebutuhan mitra, harus dimitigasi melalui instrumen pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman operasional yang mampu mengatur alur kerja PkM mulai dari tahap analisis kebutuhan, pengusulan berbasis kepakaran, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi luaran secara periodik.

Penjaminan mutu PkM juga mencakup aspek keteraksesan informasi dan transparansi data melalui sistem informasi digital. Seluruh aktivitas pengabdian wajib terdokumentasi dalam pangkalan data yang terintegrasi, memudahkan proses audit mutu internal (AMI) maupun eksternal. Dengan sistem dokumentasi yang andal, setiap rupiah investasi pengabdian baik yang bersumber dari dana internal universitas maupun hibah eksternal, dapat dipertanggungjawabkan kebermanfaatannya bagi pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, Pedoman Pelaksanaan PkM ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Program Studi BKI dalam menjalankan amanah Tridharma. Melalui pedoman ini, diharapkan tercipta sinergi yang harmonis antara visi keunggulan penelitian pesisir dengan aksi nyata pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris UNTIKA Luwuk sebagai pusat rujukan literasi dan budaya maritim yang bermartabat, inovatif, dan memberikan dampak transformatif bagi kemajuan Bangsa Indonesia di kancah global.

1.2. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disusun dengan tujuan utama untuk menciptakan standar kualitas yang tinggi dan terukur dalam setiap aktivitas pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Adapun tujuan secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1) Menjamin Sinkronisasi Strategis antara Aktivitas PkM dengan Roadmap Wilayah Pesisir dan Laut

Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan tidak keluar dari koridor visi program studi. Mengingat distingsi keilmuan kita yang berfokus pada wilayah pesisir, pedoman ini berfungsi sebagai instrumen kendali agar tema-tema pengabdian, mulai dari pendampingan literasi bahasa hingga digitalisasi budaya yang selalu berakar pada kebutuhan masyarakat maritim di Kabupaten Banggai. Dengan adanya pedoman ini, program studi dapat menjamin bahwa PkM bukan merupakan kegiatan yang tersebar tanpa arah, melainkan satu kesatuan langkah strategis untuk membangun reputasi internasional dalam kajian bahasa dan budaya maritim.

2) *Mengakselerasi Hilirisasi Hasil Penelitian Menjadi Inovasi Pengabdian yang Berdaya Guna*

Sejalan dengan diferensiasi misi program studi pada bidang Penelitian, pedoman ini bertujuan untuk memformalkan mekanisme Research-led Community Service. Melalui aturan yang ketat, program studi mewajibkan setiap usulan PkM didasarkan pada temuan riset empiris dosen sebelumnya. Hal ini bertujuan agar solusi yang ditawarkan kepada masyarakat bukan sekadar asumsi, melainkan produk intelektual yang teruji secara saintifik. Pedoman ini mengarahkan agar data-data penelitian sosiolinguistik, sastra lisan, maupun pedagogi bahasa Inggris sampai di masyarakat dalam bentuk modul pelatihan, aplikasi digital, atau buku panduan praktis yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat mitra.

3) *Menjamin Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Siklus PPEPP*

Pedoman ini disusun sebagai perwujudan nyata dari kepatuhan terhadap siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian prosedur bagi dosen dan mahasiswa, mulai dari tahap perencanaan yang akuntabel hingga tahap evaluasi dampak yang jujur. Dengan adanya standar operasional yang baku, program studi dapat memitigasi risiko kegagalan program dan memastikan bahwa setiap hambatan di lapangan segera ditangani.

4) *Mendorong Pencapaian Luaran PkM yang Produktif, Berstandar Nasional, dan Memiliki Rekognisi HKI*

Salah satu target utama program studi adalah mempertahankan dan meningkatkan tren produktivitas luaran yang telah dicapai. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis bagi dosen dalam menghasilkan luaran wajib berupa publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi SINTA serta produk inovasi yang terlindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan menetapkan standar bahwa setiap PkM unggulan wajib menghasilkan buku ber-ISBN atau HKI, pedoman ini memacu dosen untuk tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi menghasilkan aset intelektual yang diakui secara nasional dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

5) *Mengoptimalkan Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM sebagai Bagian dari Penguatan Kompetensi Lulusan (MBKM)*

Pedoman ini bertujuan untuk mendesain PkM sebagai wahana pembelajaran luar kelas yang efektif bagi mahasiswa. Dengan mewajibkan pelibatan mahasiswa dalam setiap tim pengabdian, program studi berupaya memberikan pengalaman experiential learning yang mendalam. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menerapkan teori komunikasi bahasa Inggris dalam situasi sosial yang kompleks di wilayah pesisir. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk membentuk profil lulusan yang memiliki kematangan sosial, empati terhadap kearifan lokal, dan kemampuan manajerial di lapangan, sehingga mereka menjadi sarjana yang siap pakai di dunia industri maupun pendidikan.

6) *Membangun dan Memelihara Kepercayaan Stakeholder melalui Layanan Kepakaran yang Profesional*

Sebagai institusi pendidikan yang berada di wilayah strategis, program studi bertujuan untuk menjadi pusat rujukan solusi bagi pemerintah daerah, industri, dan masyarakat desa. Pedoman ini mengatur standar perilaku dan etika dosen saat menjalankan tugas pengabdian di luar kampus, guna menjaga nama baik almamater. Tujuannya adalah agar setiap layanan kepakaran yang diberikan, baik dalam bentuk narasumber pelatihan pemandu wisata maupun konsultan literasi, yang selalu memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis dengan pihak eksternal, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan public trust terhadap eksistensi program studi.

BAB II

STANDAR DAN KETENTUAN UMUM

2.1. Kualifikasi Pelaksana

Penetapan kualifikasi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan langkah awal dalam siklus Penjaminan Mutu (PPEPP) untuk memastikan bahwa setiap intervensi sosial yang dilakukan oleh Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris memiliki bobot akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Program studi menetapkan bahwa pengabdian masyarakat bukan sekadar aktivitas volunteerisme, melainkan sebuah penugasan profesional yang membutuhkan sinkronisasi antara kepakaran teoretis dengan kemahiran praktis. Oleh karena itu, standar pelaksana PkM dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur Dosen sebagai penggerak utama dan unsur Mahasiswa sebagai mitra pelaksana, di mana keduanya harus memenuhi kriteria kualifikasi yang ketat guna menjamin kualitas luaran dan dampak bagi masyarakat mitra.

Bagi unsur pendidik, pelaksana PkM wajib berstatus sebagai Dosen Tetap atau Dosen Penghitung Rasio (DPR) pada Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris yang telah terdaftar secara resmi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Mengacu pada data SDM prodi, seluruh dosen pelaksana wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) atau Doktoral (S3) dari perguruan tinggi bereputasi. Standar pendidikan tinggi ini menjadi jaminan bahwa materi pengabdian yang disampaikan kepada masyarakat, seperti pelatihan Professional English bagi industri pariwisata atau pendampingan literasi budaya, disusun berdasarkan metodologi keilmuan yang mutakhir dan tidak bersifat superfisial.

Aspek linearitas keahlian menjadi syarat mutlak dalam penentuan kualifikasi ketua pelaksana PkM. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mewajibkan tema pengabdian selaras dengan bidang kepakaran dosen yang tertuang dalam SK Penetapan Kepakaran. Hal ini bertujuan agar pengabdian yang dilakukan benar-benar merupakan bentuk layanan pakar (expert services). Adapun pembidangan kepakaran yang menjadi standar pelaksana PkM di PS BKI meliputi:

- 1) ***Kepakaran Linguistik Terapan:*** Bertanggung jawab pada program PkM bertema revitalisasi bahasa daerah, penerjemahan dokumen publik, dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris kontekstual.
- 2) ***Kepakaran Kajian Budaya dan Sastra:*** Bertanggung jawab pada program PkM bertema dokumentasi tradisi lisan, digitalisasi kearifan lokal pesisir, dan promosi budaya lokal ke tingkat internasional.
- 3) ***Kepakaran English Language Teaching (ELT):*** Bertanggung jawab pada program pendampingan profesional bagi guru-guru di wilayah pesisir dan pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak pesisir (English for Young Learners).

Selaras dengan fokus Diferensiasi Misi pada bidang Penelitian, setiap pelaksana PkM wajib memiliki rekam jejak riset yang relevan dengan tema pengabdian yang diusulkan. Kualifikasi ini mensyaratkan dosen untuk telah memublikasikan hasil penelitian terkait keunggulan wilayah pesisir dan laut sebelum menerjunkannya ke dalam aksi pengabdian. Dengan syarat ini, pelaksana PkM dipastikan memiliki kedalaman data dan pemahaman sosiokultural yang komprehensif mengenai masyarakat mitra, sehingga program pengabdian yang dihasilkan dapat menjadi model hilirisasi riset yang efektif dan memiliki nilai keterbaruan (novelty) bagi masyarakat lokal.

Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga menjadi bagian dari kualifikasi pelaksana. Setiap dosen diwajibkan telah mengikuti pelatihan metodologi pengabdian masyarakat, seperti Participatory Action Research (PAR) atau Asset-Based Community Development (ABCD). Kepemilikan Sertifikat Pendidik (Serdos) serta keikutsertaan dalam workshop penulisan artikel PkM dan pendaftaran HKI juga menjadi nilai tambah dalam evaluasi kualifikasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki kemahiran dalam mendokumentasikan hasil pengabdian menjadi produk intelektual berkualitas.

Keterlibatan mahasiswa dalam tim PkM bukan merupakan pilihan, melainkan kewajiban prosedural dalam struktur organisasi pengabdian PS BKI. Mahasiswa yang dilibatkan minimal berjumlah 3 (tiga) orang per judul PkM dan harus merupakan mahasiswa aktif yang telah menempuh minimal 4 (empat) semester. Hal ini dilakukan agar mahasiswa yang diterjunkan sudah memiliki bekal kompetensi kebahasaan yang memadai untuk melakukan pendampingan di lapangan. Penentuan mahasiswa anggota tim dilakukan melalui proses seleksi minat bakat oleh dosen ketua pelaksana, guna

memastikan adanya kecocokan (matching) antara kebutuhan program pengabdian dengan potensi akademik mahasiswa yang bersangkutan.

Secara operasional, mahasiswa pelaksana PkM harus mendapatkan pembekalan khusus mengenai etika berkomunikasi dengan masyarakat pesisir dan protokol keselamatan kerja (K3). Kualifikasi mahasiswa dalam PkM juga diintegrasikan dengan capaian kurikulum melalui skema rekognisi mata kuliah (MBKM). Pengalaman lapangan mahasiswa dalam membantu riset pengabdian dosen, seperti dalam proyek Revitalisasi Taman Wisata Arboretum, akan dikonversi menjadi nilai SKS pada mata kuliah yang relevan, seperti Contextual English Words atau Sociolinguistics. Hal ini menuntut mahasiswa pelaksana untuk memiliki kedisiplinan tinggi dalam mengisi logbook harian sebagai bukti kinerja profesional mereka di lapangan.

Struktur kepemimpinan dalam tim PkM juga diatur untuk menjamin adanya transfer pengetahuan melalui mekanisme mentorship. Kualifikasi tim yang ideal di PS BKI terdiri dari kombinasi antara dosen senior (Lektor) sebagai pengarah strategis dan dosen junior (Asisten Ahli) sebagai pelaksana teknis, didukung oleh mahasiswa aktif sebagai asisten lapangan. Model kolaborasi lintas generasi ini memastikan bahwa pengalaman profesional dalam mengelola masyarakat mitra dapat terwariskan dengan baik, sekaligus menjaga keberlanjutan program desa binaan agar tidak bersifat insidental namun terencana dalam jangka panjang sesuai dengan Roadmap PkM.

Integritas moral dan etika akademik merupakan kualifikasi fundamental yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaksana PkM. Setiap anggota tim wajib menandatangani Pakta Integritas PkM yang memuat komitmen untuk menghormati norma budaya lokal masyarakat Banggai serta menjauhi praktik plagiarisme dalam penyusunan produk luaran. Pelaksana PkM di PS BKI harus mampu menjadi representasi dari visi universitas yang bermartabat. Kegagalan dalam menjaga etika di lapangan dapat berdampak pada pencabutan hak dosen untuk mengajukan hibah PkM internal di masa mendatang, sebagai bentuk tindakan pengendalian mutu yang tegas dari UPPS.

Terakhir, kualifikasi pelaksana PkM dievaluasi secara periodik melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pimpinan UPPS melakukan verifikasi terhadap kesesuaian komposisi tim dan kepakaran yang terlibat dalam setiap laporan PkM. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keahlian pelaksana dengan dampak yang dihasilkan, maka program studi akan memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas melalui coaching clinic atau pelatihan khusus. Sistem pengawasan kualifikasi yang ketat ini merupakan

jaminan bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap kegiatan pengabdian di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris dijalankan oleh personel yang benar-benar kompeten, berdedikasi, dan selaras dengan misi keunggulan wilayah.

2.2. Kualifikasi Pelaksana

Penentuan tema dalam setiap aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris diatur secara ketat untuk menjamin terjadinya integrasi yang koheren antara visi keilmuan, hasil penelitian, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra. Program studi menetapkan bahwa relevansi tema bukan sekadar kesesuaian judul, melainkan sebuah manifestasi dari English for Coastal and Marine Literacy. Berikut adalah standar dan klaster tema yang disarankan:

A. Filosofi Integrasi Tema: Hilirisasi Riset Terapan

Relevansi tema PkM di Program Studi BKI berpijak pada prinsip No Service Without Research, yang berarti setiap tema pengabdian wajib merupakan bentuk hilirisasi dari hasil penelitian terapan yang telah dilakukan oleh dosen pelaksana. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa solusi atau materi yang diberikan kepada masyarakat memiliki dasar epistemologis yang kuat dan telah teruji secara akademik. Dengan pendekatan ini, pengabdian masyarakat tidak lagi bersifat asuntif, melainkan didasarkan pada data riset sosiolinguistik, etnografi, maupun pedagogi yang valid. Hal ini selaras dengan Diferensiasi Misi program studi yang menempatkan Penelitian sebagai poros utama pengembangan, sehingga setiap aktivitas pengabdian menjadi bukti nyata kemanfaatan ilmu pengetahuan bagi pembangunan daerah.

Secara operasional, penyelarasan tema ini mewajibkan setiap pengusul PkM untuk melampirkan referensi penelitian terdahulu dalam proposal mereka. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan siklus tridharma yang tertutup, di mana hasil riset mengenai keunikan wilayah pesisir Luwuk Banggai diimplementasikan menjadi program pemberdayaan masyarakat yang konkret. Sebagai contoh, temuan riset mengenai hambatan fonetik penutur asli di pesisir Sulawesi Timur menjadi dasar bagi tema PkM berupa Metode Pengajaran Bahasa Inggris Berbasis Aksentuasi Lokal. Strategi ini menjamin bahwa setiap program pengabdian memiliki nilai keterbaruan (novelty) dan orisinalitas yang tinggi, yang pada akhirnya mempermudah pencapaian luaran berupa HKI dan publikasi di jurnal nasional terakreditasi.

B. Klaster Tema Unggulan: Fokus Wilayah Pesisir dan Laut

Program Studi menetapkan tiga klaster tema unggulan yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan PkM, guna memperkuat identitas prodi sebagai pusat literasi bahari. Klaster pertama adalah English for Coastal Development (ECD), yang berfokus pada pendampingan komunikasi bahasa Inggris bagi pelaku ekonomi di wilayah pantai. Tema-tema dalam klaster ini mencakup pelatihan bahasa Inggris praktis bagi nelayan modern, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pelaku UMKM di desa pesisir. Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Banggai agar mampu berinteraksi secara profesional dalam ekosistem pariwisata global.

Klaster kedua adalah Digital Literacy and Local Heritage Promotion, yang menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi untuk mendokumentasikan dan mempromosikan kearifan lokal dalam pengantar bahasa Inggris. Tema-tema dalam klaster ini sangat relevan dengan kebutuhan digitalisasi di era industri 4.0, seperti pengembangan naskah digital untuk Karisma Event Nasional: Festival Tumbe atau pembuatan media edukasi berbasis Barcode di Taman Wisata Arboretum. Melalui klaster ini, PkM berperan sebagai katalisator dalam membangun Arsip Digital Budaya Pesisir yang dapat diakses oleh wisatawan mancanegara, sekaligus menjadi sarana praktik bagi mahasiswa dalam menerapkan kemahiran Digital Literacy yang diperoleh di bangku kuliah.

Klaster ketiga adalah Culturally Responsive Teaching & Literacy (CRT), yang diarahkan untuk memberikan solusi bagi tantangan pendidikan di wilayah terpencil dan pesisir. Tema-tema pengabdian dalam klaster ini difokuskan pada peningkatan kapasitas guru bahasa Inggris di desa-desa binaan agar mampu menyusun materi ajar yang relevan dengan lingkungan alam dan budaya siswa (maritim). Program Fun English for Kids yang dilaksanakan di desa-desa pesisir merupakan salah satu implementasi sukses dari klaster ini. Tema ini menjamin bahwa pengajaran bahasa Inggris di wilayah pesisir tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, sehingga pendidikan menjadi instrumen penguatan jati diri, bukan penyebab keterasingan budaya bagi generasi muda.

C. Sinkronisasi dengan Kebutuhan DUDI dan Pemerintah Daerah

Relevansi tema PkM juga diukur melalui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai. Program studi secara aktif menjalin dialektika dengan mitra industri strategis, untuk menyerap aspirasi mengenai profil kompetensi bahasa Inggris yang

dibutuhkan di lapangan. Hal ini menghasilkan tema-tema pengabdian yang bersifat Link and Match, seperti program English For Practice yang dirancang khusus untuk memenuhi standar komunikasi profesional di kawasan industri internasional Sulawesi Tengah. Penyesuaian tema berbasis kebutuhan industri ini memberikan dampak pada rekognisi kepakaran dosen di mata stakeholder eksternal.

Selain itu, pimpinan program studi memastikan bahwa tema PkM berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah dalam pelestarian budaya dan promosi daerah. Penyelarasan tema dengan agenda besar daerah, seperti pendampingan literasi di wilayah Pulo Dua atau Toili Barat, merupakan bukti bahwa Program Studi BKI hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Relevansi ini dibuktikan secara legal melalui dokumen Memorandum of Agreement (MoA) dengan berbagai instansi mitra, yang di dalamnya memuat komitmen bersama untuk mengembangkan tema-tema pengabdian yang berdampak luas bagi kemajuan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

D. Standar Luaran sebagai Parameter Relevansi Tema

Program Studi menetapkan standar bahwa setiap tema PkM yang terpilih harus memiliki potensi untuk menghasilkan luaran intelektual yang tervalidasi. Tema yang bersifat umum dan tidak memiliki kedalaman analisis kearifan lokal cenderung akan ditolak dalam proses seleksi internal. Sebaliknya, tema yang memiliki relevansi kuat dengan misi pesisir didorong untuk menghasilkan produk nyata seperti Buku Panduan PkM ber-ISBN atau karya seni/budaya yang didaftarkan HKI-nya. Keberhasilan menghasilkan 14 buku referensi dan 8 HKI dalam tiga tahun terakhir merupakan indikator bahwa proses penentuan tema di BKI Untika Luwuk telah berjalan secara efektif dan berorientasi pada kualitas produk intelektual.

Integritas akademik tetap menjadi pilar dalam penentuan relevansi tema. Setiap tema pengabdian diwajibkan menjunjung tinggi etika lingkungan dan penghormatan terhadap norma sosial masyarakat pesisir. Tema PkM harus mampu mencerminkan nilai-nilai Budaya Mutu yang dicanangkan universitas, di mana setiap aktivitas pengabdian tidak hanya berhenti pada laporan kegiatan, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengayaan materi mata kuliah (Research-led Teaching). Dengan demikian, data-data lapangan dari pengabdian bertema pesisir akan ditarik kembali ke dalam ruang kelas sebagai studi kasus nyata bagi mahasiswa, sehingga kurikulum prodi tetap dinamis dan mutakhir.

Sebagai penutup, evaluasi terhadap relevansi tema dilakukan secara berkala setiap tahun melalui Rapat Tinjauan Mutu (RTM). Tim pengembang kurikulum dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) meninjau sejauh mana tema-tema yang telah dilaksanakan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan ketercapaian visi prodi. Jika ditemukan tema yang mulai kehilangan relevansinya dengan dinamika wilayah, maka prodi akan segera melakukan re-orientasi tema dalam Peta Jalan PkM berikutnya. Konsistensi dalam menjaga relevansi tema inilah yang menjadi kunci utama bagi Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris dalam meraih kepercayaan dari asesor akreditasi dan masyarakat luas sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada solusi dan keunggulan lokal.

2.3. Pendanaan

Sistem pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris dirancang untuk menjamin stabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memandang ketersediaan anggaran sebagai investasi strategis untuk mewujudkan Budaya Mutu dan mencapai target luaran yang kompetitif. Kebijakan pendanaan PkM berpijak pada prinsip akuntabilitas di mana setiap rupiah yang dialokasikan harus berkorelasi langsung dengan ketercapaian misi keunggulan wilayah pesisir. Berikut adalah struktur dan sumber pendanaan yang ditetapkan:

A. Pendanaan Internal dan Kompetisi Berbasis Mutu

Sumber pendanaan utama berasal dari Hibah Internal UPPS/Universitas yang dialokasikan setiap tahun anggaran melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Pendanaan ini dikelola dengan mekanisme kompetisi proposal yang sehat dan transparan. Setiap tim dosen wajib mengajukan proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang rasional dan efisien. Proses seleksi dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) dengan melibatkan reviewer internal untuk menilai kelayakan substansi dan kemanfaatan program bagi masyarakat mitra. Mekanisme seleksi ini merupakan bagian dari tahap Penetapan (P) dalam siklus PPEPP, guna memastikan bahwa dana internal universitas digunakan untuk mendukung program-program pengabdian yang paling relevan dengan visi sosiolinguistik dan budaya pesisir.

Secara teknis, alokasi hibah internal diarahkan untuk menutupi biaya operasional lapangan, pengadaan bahan ajar bagi masyarakat, serta biaya diseminasi

luaran awal. Pemberian hibah internal ini juga berfungsi sebagai stimulus bagi dosen untuk meningkatkan produktivitas mereka sebelum melangkah ke kompetisi pendanaan yang lebih luas di tingkat nasional. Universitas berkomitmen dalam menyediakan dana internal pada program pengabdian yang melibatkan mahasiswa secara aktif. Hal ini memberikan jaminan bagi kelancaran operasional tridharma di tingkat program studi.

B. Akses Pendanaan Eksternal dan Hibah Kompetitif Nasional

Sebagai upaya meningkatkan prestise dan dampak pengabdian, Program Studi mendorong dosen untuk meraih Hibah Kompetitif Nasional melalui platform BIMA (Kemdiktisaintek). Pendanaan ini memiliki urgensi tinggi karena mensyaratkan standar kualitas yang ketat dan pengakuan kepakaran di level nasional. Keberhasilan dosen dalam memenangkan hibah BIMA menunjukkan bahwa tema-tema pengabdian yang diusung oleh PS BKI, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat bahari, memiliki nilai strategis yang diakui oleh negara. Pendanaan nasional ini biasanya dialokasikan untuk program PkM yang memiliki jangkauan dampak lebih luas dan luaran yang lebih kompleks.

UPPS memberikan dukungan teknis bagi dosen pengusul hibah nasional dalam bentuk pendampingan penulisan proposal (coaching clinic) dan fasilitasi administrasi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Sinergi antara dana nasional dengan visi prodi memungkinkan terlaksananya program pengabdian yang komprehensif. Keberhasilan meraih dana eksternal ini terdokumentasi dalam pangkalan data SISTER dan menjadi indikator kinerja utama (IKU) yang meningkatkan nilai akreditasi program studi di aspek akuntabilitas finansial.

C. Dedikasi Profesional melalui Dana Mandiri Dosen

Program Studi juga mengakui Dana Mandiri Dosen sebagai salah satu pilar pendanaan yang sah dan bernilai tinggi secara moral dan profesional. Pendanaan mandiri mencerminkan etos kerja dan dedikasi dosen dalam menjalankan amanah tridharma tanpa harus selalu bergantung pada ketersediaan hibah kompetitif. Kegiatan PkM mandiri biasanya dilakukan untuk program-program pendampingan rutin yang sifatnya mendesak atau berkelanjutan di desa binaan terdekat. Meskipun menggunakan dana pribadi, setiap aktivitas PkM mandiri tetap wajib melalui prosedur administratif yang sama, yakni memiliki Surat Tugas dan melaporkan hasil kegiatan serta luaran ke dalam sistem informasi universitas.

Pengakuan terhadap PkM mandiri di PS BKI diberikan dalam bentuk ekuivalensi SKS pada Beban Kerja Dosen (BKD). Program studi menjamin bahwa dosen yang melakukan pengabdian mandiri tetap mendapatkan hak rekognisi akademik yang setara. Selain itu, luaran dari PkM mandiri, seperti modul sederhana atau artikel pengabdian, tetap didorong untuk didaftarkan HKI-nya dengan dukungan pembiayaan pendaftaran dari universitas. Hal ini membuktikan bahwa universitas sangat menghargai kontribusi intelektual dosen dalam bentuk apapun, guna memastikan tidak ada hambatan finansial yang menghalangi misi pemberdayaan masyarakat pesisir.

D. Sinergi Kemitraan: CSR Industri dan Dana Desa

Strategi pendanaan yang paling inovatif di PS BKI adalah melalui Kerjasama Kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR). Mengingat lokasi universitas yang berdekatan dengan industri strategis internasional, program studi secara proaktif menjalin kolaborasi dengan perusahaan besar seperti PT Donggi-Senoro LNG. Pendanaan dari sektor industri diarahkan untuk program pengabdian yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar area operasional industri. Program English for Practice adalah contoh nyata dimana pendanaan operasional disediakan oleh mitra industri, sementara kepakaran keilmuan disediakan oleh dosen prodi.

Selain kemitraan industri, program studi juga mengoptimalkan potensi Dana Pemerintah Desa sebagai sumber pendanaan kolaboratif. Melalui perjanjian kerjasama (MoA) dengan desa-desa binaan di wilayah pesisir, prodi mendorong adanya pembagian beban biaya (cost-sharing) untuk program-program yang menjadi prioritas pembangunan desa, seperti pengembangan Desa Wisata Arboretum atau Kampung Inggris Digital. Dalam model ini, desa menyediakan fasilitas lapangan dan biaya mobilisasi masyarakat, sementara prodi menyediakan modul dan tenaga ahli. Pola ini menjamin adanya rasa kepemilikan (sense of ownership) yang tinggi dari masyarakat mitra terhadap keberlanjutan program pengabdian.

E. Penjaminan Mutu dan Akuntabilitas Laporan (Evaluasi - E)

Seluruh dana yang dikelola untuk kegiatan PkM, baik dari sumber internal maupun eksternal, wajib dilaporkan dengan standar akuntansi yang ketat. Auditor internal dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Tompotika Luwuk secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan PkM untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. Akuntabilitas ini sangat penting untuk

membangun kepercayaan dari pemberi hibah dan mitra industri. Dokumentasi keuangan yang rapi merupakan bagian dari bukti fisik yang akan dipresentasikan kepada asesor akreditasi sebagai jaminan bahwa tata kelola keuangan prodi berjalan secara transparan dan berintegritas.

Sebagai langkah penutup dalam siklus Peningkatan (P), hasil evaluasi pendanaan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat fakultas. Pimpinan UPPS menelaah efisiensi penggunaan dana terhadap luaran yang dihasilkan (seperti jumlah buku dan HKI). Jika sebuah sumber pendanaan terbukti memberikan dampak yang sangat tinggi terhadap pencapaian IKU prodi, maka universitas akan meningkatkan alokasi anggaran atau memperluas jaringan kemitraan pada tahun berikutnya. Konsistensi dalam mengelola diversitas sumber dana inilah yang menjadikan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris mandiri secara finansial dan tangguh dalam mewujudkan visi internasionalisasi budaya pesisir melalui pengabdian yang berdampak nyata.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

3.1. Tahap Pengusulan (Submission)

Tahap pengusulan merupakan fase krusial dalam sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Pada tahap ini, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan filterisasi terhadap orisinalitas, relevansi, dan kelayakan setiap rencana pengabdian yang akan diterjunkan ke masyarakat. Prosedur pengusulan didesain untuk memastikan bahwa PkM bukan sekadar aktivitas rutin, melainkan sebuah proyek intelektual yang terencana secara sistematis. Berikut adalah rincian tahapan pengusulan yang harus dilalui oleh setiap pengusul:

A. Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Kontekstual (Pre-Submission)

Sebelum mengunggah proposal secara formal, setiap Dosen Penghitung Rasio (DPR) diwajibkan melakukan Analisis Kebutuhan Masyarakat (Community Needs Analysis). Prosedur ini mewajibkan dosen untuk terjun langsung atau melakukan komunikasi awal dengan pemangku kepentingan di wilayah sasaran, khususnya di desa-desa pesisir Kabupaten Banggai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gap literasi atau kendala komunikasi bahasa Inggris yang dihadapi oleh mitra, seperti pelaku wisata di Pulo Dua atau kelompok sadar wisata di Arboretum. Hasil identifikasi ini harus dituangkan dalam instrumen survei atau notulensi Focus Group Discussion (FGD) yang nantinya menjadi lampiran wajib dalam dokumen proposal PkM. Langkah ini menjamin bahwa pengabdian masyarakat yang diusulkan bersifat solutif dan berbasis data lapangan (evidence-based), bukan sekadar keinginan subjektif pengusul.

Selain analisis kebutuhan mitra, tahap pra-pengusulan juga mewajibkan adanya Sinkronisasi Hasil Penelitian. Sejalan dengan misi prodi yang berfokus pada penelitian, setiap usulan PkM harus mencantumkan keterkaitannya dengan riset yang telah dilakukan oleh dosen sebelumnya. Dosen diwajibkan menjelaskan bagaimana temuan riset, misalnya riset mengenai dialek lokal atau folklor pesisir, akan diintegrasikan ke dalam program pengabdian. Hal ini memastikan terjadinya hilirisasi keilmuan yang berkelanjutan. Tanpa adanya keterkaitan riset yang jelas, proposal akan dikembalikan oleh program studi untuk direvisi, guna menjaga identitas unik prodi BKI Untika Luwuk sebagai institusi yang mengedepankan pengabdian berbasis riset terapan.

B. Diversifikasi Kanal Pengusulan dan Manajemen Administrasi Proposal

Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris menetapkan sistem manajemen proposal yang adaptif melalui empat kanal utama, guna memastikan seluruh inisiatif pengabdian dosen dapat terfasilitasi dengan baik. Kanal pertama diperuntukkan bagi Skema Hibah Kompetitif Nasional, di mana dosen pengusul melakukan submisi secara mandiri melalui platform BIMA (Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian) milik Kemdiktisaintek. Kanal ini memiliki standar seleksi yang sangat ketat di tingkat nasional, sehingga program studi memberikan pendampingan khusus bagi dosen yang membidik skema ini. Pengusulan melalui BIMA merupakan tolok ukur pengakuan kepakaran dosen di level kancah nasional yang secara langsung meningkatkan reputasi institusi.

Kanal kedua dikhususkan untuk Skema Hibah UPPS/Internal Universitas. Untuk kanal ini, tim dosen diwajibkan memasukkan dokumen proposal melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tompotika Luwuk. LPPM bertindak sebagai gerbang penjaminan mutu internal yang melakukan verifikasi terhadap kesesuaian anggaran, rencana luaran, dan ketaatan terhadap standar universitas. Mekanisme ini menjamin bahwa dana internal universitas dialokasikan secara akuntabel untuk program-program yang mendukung Key Performance Indicator (KPI) fakultas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan keunggulan wilayah pesisir.

Kanal ketiga adalah untuk Skema PkM Mandiri. PS BKI sangat menghargai dedikasi dosen yang melakukan pengabdian dengan sumber pendanaan mandiri. Dalam kanal ini, proposal dimasukkan langsung ke Tingkat Program Studi. Meskipun didanai secara pribadi, pengusulan ke prodi tetap bersifat wajib guna memastikan aktivitas tersebut terekam dalam database kinerja dosen dan beban kerja semesteran (EWMP). Dengan memasukkan proposal ke prodi, pimpinan dapat memantau keterlibatan mahasiswa dan memberikan dukungan administratif berupa penerbitan Surat Tugas, sehingga PkM mandiri tetap memiliki legalitas formal dan integritas akademik yang sama dengan PkM hibah.

Kanal keempat merupakan kanal strategis untuk Skema Kerjasama Kemitraan (seperti CSR Industri LNG atau Dana Pemerintah Desa). Prosedur pengusulan dilakukan melalui Program Studi sebagai pusat koordinasi. Tim dosen memasukkan draf program ke prodi, yang selanjutnya prodi akan bertindak sebagai fasilitator untuk meneruskan dan mempresentasikan proposal tersebut kepada mitra eksternal. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan akademik prodi dengan kebutuhan praktis mitra. Melalui koordinasi satu pintu di program studi, hubungan kemitraan dapat dikelola secara

lebih profesional, sehingga MoA/PKS yang telah disepakati dapat diimplementasikan menjadi program kerja yang konkret dan berkelanjutan.

C. Formasi Tim dan Integrasi Mahasiswa (MBKM)

Aspek fundamental dalam tahap pengusulan adalah Pembentukan Tim Pengabdian yang Inklusif. Setiap proposal wajib mencantumkan formasi tim yang terdiri dari minimal satu orang ketua (DPR linear) dan anggota dosen, serta wajib melibatkan minimal 3 (tiga) mahasiswa aktif. Pelibatan mahasiswa dalam tahap pengusulan bukan sekadar pencantuman nama, melainkan harus disertai dengan uraian tugas (job description) mahasiswa di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana aktivitas PkM mahasiswa akan dikonversi menjadi bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah tertentu. Program studi melakukan verifikasi terhadap daftar mahasiswa untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka memberikan nilai tambah pada portofolio akademik (SKPI) mereka kelak.

Program studi juga mendorong adanya Kolaborasi Lintas Kepakaran dalam penyusunan tim PkM. Dosen dengan keahlian Linguistik diharapkan dapat berkolaborasi dengan dosen keahlian Budaya atau Metodologi Pengajaran dalam satu judul pengabdian. Diversitas kepakaran ini diyakini mampu menghasilkan program pengabdian yang lebih komprehensif untuk membedah masalah masyarakat pesisir dari berbagai sudut pandang. Dalam tahap pengusulan, koherensi antar kepakaran anggota tim menjadi poin penilaian tambahan, karena menunjukkan keseriusan prodi dalam membangun ekosistem akademik yang kolaboratif dan tidak terkotak-kotak dalam ego sektoral keilmuan.

D. Verifikasi Kelayakan dan Kepatuhan Standar)

Seluruh proposal yang masuk melalui empat kanal di atas (kecuali kanal nasional BIMA yang direview oleh pusat) wajib melewati tahap Verifikasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat fakultas. Verifikasi ini dilakukan untuk menjaga "Garis Merah" visi program studi. Reviewer internal memeriksa apakah muatan materi pengabdian telah mengintegrasikan literasi bahasa Inggris dengan konten kearifan lokal pesisir. Bagi usulan yang masuk ke prodi (skema mandiri dan mitra), Kaprodi melakukan supervisi awal sebelum proposal diteruskan ke tahap berikutnya, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih lokasi pengabdian antar dosen.

Komitmen terhadap integritas akademik diimplementasikan secara seragam pada seluruh kanal pengusulan. Setiap draf materi pengabdian, baik modul pelatihan maupun

naskah publikasi yang diajukan, wajib melalui uji Anti-Plagiasi menggunakan Turnitin. Prosedur ini tidak membedakan sumber dana; baik hibah nasional BIMA, hibah internal LPPM, maupun dana mandiri, semuanya wajib memenuhi standar orisinalitas maksimal 25%. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistemik prodi untuk menjamin bahwa 22 luaran yang ditargetkan (8 HKI dan 14 Buku) benar-benar mencerminkan integritas intelektual Program Studi BKI

E. Penetapan dan Legalitas Penugasan

Sebagai tahap akhir dari prosedur pengusulan, pimpinan UPPS menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan atau Surat Tugas bagi seluruh proposal yang dinyatakan layak di masing-masing kanal. Legalitas ini menjadi bukti sah penugasan tridharma yang akan diunggah ke sistem SISTER. Khusus untuk skema kemitraan, penetapan ini juga diikuti dengan penandatanganan Implementation Arrangement (IA) dengan pihak mitra. Dengan adanya diversifikasi kanal pengusulan yang terstruktur mulai dari BIMA, LPPM, hingga Prodi, Program Studi BKI menunjukkan kematangan tata kelola SDM yang responsif terhadap berbagai peluang pendanaan, demi mewujudkan visi internasionalisasi budaya pesisir secara konsisten.

3.2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan lapangan merupakan fase operasionalisasi dari rencana strategis yang telah disusun pada tahap pengusulan. Pada tahap ini, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris menerjunkan tim yang terdiri dari Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Banggai. Pelaksanaan lapangan didesain bukan sekadar sebagai aktivitas kunjungan, melainkan sebagai proses Intervensi Edukatif berbasis Riset. Keberfungsian tahap ini menjadi indikator utama keberhasilan diferensiasi misi prodi dalam membangun literasi masyarakat bahari yang adaptif terhadap tantangan global.

1) Mobilisasi Tim dan Koordinasi Lintas Sektoral:

Pelaksanaan diawali dengan koordinasi formal antara tim PkM dengan pemangku kepentingan di lokasi sasaran. Tim melakukan pertemuan pembuka (kick-off meeting) dengan Pemerintah Desa atau pengelola industri untuk menyepakati jadwal teknis dan pembagian peran. Prosedur ini sangat penting guna memastikan bahwa kehadiran tim PkM mendapatkan dukungan penuh dari otoritas lokal dan

masyarakat, sehingga program pengabdian seperti pendampingan Kampung Inggris Digital dapat berjalan secara harmonis tanpa hambatan birokrasi di lapangan.

2) Kepemimpinan Akademik di Lapangan oleh DPR:

Dosen tetap (DPR) bertindak sebagai pemimpin instruksional (instructional leader) yang bertanggung jawab penuh atas kualitas materi yang disampaikan. Mengacu pada SK Rektor No. 30.a/2025 tentang Kepakaran Dosen, dosen pengampu mata kuliah keahlian mengawal jalannya pelatihan atau pendampingan secara langsung. Dosen memastikan bahwa setiap teori linguistik dan budaya Inggris yang diajarkan kepada masyarakat, misalnya dalam pelatihan Professional Tour Guide, telah disederhanakan tanpa mengurangi esensi akademik, sehingga masyarakat dapat menyerap informasi secara efektif sesuai dengan kapasitas lokal mereka.

3) Implementasi Experiential Learning bagi Mahasiswa (MBKM):

Mahasiswa pelaksana PkM memainkan peran sebagai fasilitator sebaya dan asisten lapangan. Di bawah supervisi dosen, mahasiswa mempraktikkan kemahiran komunikasi bahasa Inggris mereka dalam situasi sosial yang nyata. Melalui keterlibatan aktif ini, mahasiswa belajar melakukan negosiasi budaya dan adaptasi bahasa dengan penutur asli di wilayah pesisir. Kinerja mahasiswa di lapangan dipantau melalui Logbook Harian Aktivitas Mahasiswa, yang nantinya menjadi bukti sah untuk konversi nilai SKS pada mata kuliah pendukung kurikulum, sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

4) Hilirisasi Riset Terapan melalui Modul dan Bahan Ajar:

Inti dari pelaksanaan lapangan di PS BKI adalah penggunaan produk riset sebagai media utama pengabdian. Tim PkM mendistribusikan dan menggunakan buku ajar hasil riset dosen, seperti Coastal Conversation of Banggai atau Contextual English Words, sebagai rujukan pelatihan bagi masyarakat. Praktik ini membuktikan bahwa PkM di prodi ini merupakan bentuk nyata hilirisasi keilmuan, di mana data-data sosiolinguistik yang telah dikaji secara ilmiah dikembalikan kepada masyarakat dalam format yang praktis dan solutif untuk meningkatkan kemahiran komunikasi mereka.

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

Sesuai dengan misi digitalisasi, pelaksanaan lapangan wajib mengintegrasikan instrumen TIK. Tim PkM membantu masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk promosi budaya, seperti pemasangan Barcode Digital pada papan informasi di Taman Wisata Arboretum. Mahasiswa membantu mengoperasikan

aplikasi dan media sosial desa guna menyebarkan konten literasi bahasa Inggris mengenai potensi wisata lokal. Keberfungsian sistem TIK di lapangan ini terdokumentasi melalui Media Digital dan Website Pengabdian, yang menjadi bukti modernitas tata kelola PkM di prodi BKI.

6) Penerapan Metode Partisipatif (PAR/ABCD):

Tim PkM menerapkan metode pengabdian yang berpusat pada masyarakat mitra. Pelaksanaan tidak dilakukan dengan metode ceramah satu arah, melainkan melalui simulasi, bermain peran (role-play), dan diskusi kelompok terpumpun (FGD). Dalam program English for Practice bersama mitra industri LNG, misalnya, tim menggunakan simulasi korespondensi bisnis riil. Pendekatan partisipatif ini menjamin adanya transfer pengetahuan yang inklusif, di mana masyarakat merasa dilibatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan.

7) Dokumentasi Data untuk Luaran Intelektual:

Selama berada di lapangan, tim melakukan pendokumentasian data yang sistematis guna persiapan penyusunan luaran (Output). Data berupa foto kegiatan, video testimoni, rekaman audio interaksi bahasa, dan catatan observasi budaya dikumpulkan secara disiplin. Dokumentasi ini bukan sekadar bukti fisik kehadiran, melainkan bahan mentah bagi dosen dan mahasiswa untuk menyusun publikasi ilmiah dan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Konsistensi pengumpulan data lapangan inilah yang menjadi kunci bagi PS BKI dalam menghasilkan 8 HKI dan 14 buku dalam kurun waktu yang singkat.

8) Penjaminan Kode Etik dan Keselamatan Kerja (K3):

Pelaksanaan di lapangan diikat oleh standar etika yang ketat. Tim wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan lokal (Local Wisdom) dan menjaga integritas profesional selama berinteraksi dengan warga desa pesisir. Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperhatikan melalui penyediaan peralatan pelindung diri dan asuransi bagi tim pengabdian yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis tinggi. Kepatuhan terhadap etika dan K3 ini dibuktikan melalui Surat Pernyataan Kepatuhan Kode Etik dan Prosedur K3L yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim sebelum keberangkatan.

9) Monitoring dan Supervisi Berkala (Evaluasi - E):

Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat fakultas atau pimpinan prodi melakukan kunjungan supervisi berkala (field visit) untuk memastikan pelaksanaan lapangan berjalan sesuai dengan Roadmap PkM. UPM memverifikasi keselarasan antara

aktivitas yang dilakukan dengan indikator capaian yang telah ditetapkan dalam proposal. Jika ditemukan deviasi atau hambatan teknis, tim supervisor memberikan arahan pengendalian di tempat. Hasil supervisi ini dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Pelaksanaan PkM, yang merupakan dokumen penting untuk menjamin akuntabilitas program di hadapan asesor akreditasi.

10) Refleksi dan Evaluasi Dampak Awal:

Pada akhir masa pelaksanaan di lokasi mitra, tim PkM melakukan sesi refleksi bersama masyarakat sasaran. Melalui kuesioner singkat atau wawancara, tim mengukur persepsi awal masyarakat terhadap manfaat program. Data kepuasan mitra yang dikumpulkan secara instan di lapangan ini menjadi dasar pengisian Analisis Kepuasan Stakeholder (Indikator 34). Sesi ini juga berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk menentukan rencana keberlanjutan program di semester berikutnya, guna memastikan bahwa PkM di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris memberikan dampak yang langgeng bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Sulawesi Tengah.

3.3. Tahap Diseminasi dan Luaran

Tahap diseminasi dan luaran merupakan fase puncak dalam siklus Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris (BKI). Pada tahap ini, seluruh data, pengalaman, dan produk inovasi yang dihasilkan selama pelaksanaan lapangan di wilayah pesisir ditransformasikan menjadi artefak intelektual yang dapat diakses oleh publik secara luas. Program Studi BKI memandang bahwa PkM belum dianggap selesai sebelum hasilnya didokumentasikan dan disebarluaskan secara formal. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa manfaat pengabdian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat mitra secara sesaat, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan literasi global.

1) *Transformasi Pengalaman Lapangan menjadi Produk Intelektual:*

Setelah kembali dari lokasi mitra (seperti Toili Barat atau Pulo Dua), tim PkM diwajibkan melakukan pengolahan data hasil interaksi dengan masyarakat. Dosen tetap (DPR) memimpin proses refleksi keilmuan untuk mengonversi catatan lapangan menjadi naskah yang terstruktur. Proses ini mencakup kategorisasi kearifan lokal yang ditemukan, analisis hambatan komunikasi, dan dokumentasi solusi kebahasaan yang telah diimplementasikan. Hasil dari proses ini menjadi bahan baku utama dalam

penyusunan buku referensi atau modul pengabdian yang mencerminkan identitas unik program studi sebagai pusat studi bahasa Inggris berbasis pesisir.

2) *Standardisasi Luaran berupa Buku Referensi ber-ISBN:*

Program Studi BKI menetapkan kebijakan bahwa setiap PkM unggulan wajib menghasilkan luaran berupa buku referensi atau buku panduan praktis yang ber-ISBN. Komitmen ini secara nyata dibuktikan dengan keberhasilan prodi menghasilkan 14 (empat belas) buku dalam tiga tahun terakhir. Proses penerbitan buku ini melalui tahap penyuntingan internal oleh tim dosen senior guna menjamin kualitas konten sosiolinguistik dan budaya yang akurat. Buku-buku seperti Coastal Conversation of Banggai menjadi bukti otentik bahwa hasil pengabdian di BKI Untika Luwuk telah terdokumentasi secara legal dan dapat dijadikan rujukan oleh praktisi pendidikan maupun pariwisata di tingkat nasional.

3) *Rekognisi Nasional melalui Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI):*

Sebagai bentuk penguatan integritas akademik dan perlindungan aset intelektual prodi, setiap produk inovatif hasil PkM didorong untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Keberhasilan meraih 8 (delapan) sertifikat HKI Hak Cipta merupakan manifestasi dari kualitas pengabdian dosen dan mahasiswa BKI. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memfasilitasi seluruh biaya pendaftaran HKI sebagai bentuk apresiasi atas kepakaran dosen. Dokumen sertifikat HKI ini menjadi bukti sah bagi asesor akreditasi bahwa luaran tridharma di prodi BKI memiliki orisinalitas tinggi dan telah diakui oleh negara sebagai karya intelektual yang sah.

4) *Publikasi Ilmiah pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Terakreditasi:*

Setiap ketua tim PkM diwajibkan menyusun artikel ilmiah yang mensintesis proses dan dampak pengabdian untuk diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi (SINTA). Diseminasi melalui jurnal ini bertujuan untuk memvalidasi metode pengabdian secara peer-reviewed. Program studi mendorong dosen untuk membidik jurnal minimal SINTA 4 ke atas guna meningkatkan sitasi dan visibilitas akademik institusi. Publikasi ini memastikan bahwa strategi "English for Coastal Tourism" atau model pengabdian di desa pesisir yang dikembangkan oleh BKI Untika Luwuk dapat dipelajari dan diadopsi oleh perguruan tinggi lain, sehingga meningkatkan pengakuan kepakaran dosen di level nasional.

5) *Digitalisasi Luaran dan Diseminasi Berbasis Teknologi (TIK):*

Sesuai dengan misi digitalisasi, diseminasi luaran juga dilakukan melalui platform media digital. Hasil riset pengabdian di Arboretum atau Kampung Inggris Digital disebarluaskan dalam bentuk video edukatif di YouTube atau konten kreatif di Instagram resmi prodi. Selain itu, penggunaan Barcode Digital di lokasi mitra merupakan bentuk diseminasi instan yang memungkinkan wisatawan mengakses luaran PkM secara langsung melalui perangkat seluler. Langkah inovatif ini memastikan bahwa setiap hasil pengabdian memiliki ketersediaan data yang tinggi (high data availability) dan dapat dimanfaatkan secara praktis oleh masyarakat luas tanpa terkendala jarak dan waktu.

6) *Pelibatan Mahasiswa sebagai Co-Author Luaran PkM:*

Dalam rangka mendukung portofolio lulusan, mahasiswa yang terlibat dalam tim PkM wajib dicantumkan sebagai penulis pendamping dalam buku ber-ISBN atau artikel jurnal. Kebijakan ini merupakan bentuk rekognisi nyata terhadap kinerja mahasiswa sekaligus media pembelajaran penulisan ilmiah sejak dini. Bagi mahasiswa, memiliki karya ber-ISBN atau sertifikat HKI bersama dosen merupakan nilai tambah yang signifikan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mereka. Hal ini membuktikan bahwa PkM di prodi BKI tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga secara sistemik meningkatkan daya saing mahasiswa angkatan pertama (2023) sebagai calon sarjana yang produktif.

7) *Integrasi Luaran ke dalam Kurikulum:*

Salah satu tujuan akhir dari diseminasi adalah terjadinya integrasi luaran PkM ke dalam proses pembelajaran di kelas (Research-led Teaching). Hasil diseminasi berupa buku dan modul PkM ditarik kembali ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah terkait, seperti Intercultural Communication dan Professional English. Mahasiswa di tahun akademik berikutnya menggunakan produk luaran ini sebagai bahan diskusi kasus nyata. Mekanisme ini menjamin kurikulum prodi tetap dinamis dan berbasis pada problematika riil di wilayah pesisir Kabupaten Banggai, sehingga tercipta siklus tridharma yang berkelanjutan dan bermutu tinggi.

8) *Pelaporan Akuntabilitas melalui Sistem SISTER:*

Seluruh bukti fisik luaran (PDF Buku, Sertifikat HKI, Tautan Jurnal) wajib diunggah secara disiplin ke dalam pangkalan data internal universitas serta sistem nasional seperti SISTER. Prosedur pelaporan ini merupakan bagian dari pilar Akuntabilitas, di mana setiap luaran PkM dosen harus sinkron dengan data yang dilaporkan di PD

Dikti. Program studi melakukan audit rutin terhadap kelengkapan unggahan luaran ini setiap akhir semester melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketertiban administrasi ini menjamin bahwa seluruh prestasi luaran prodi terekam secara akurat dan siap untuk diverifikasi kapanpun oleh tim asesor.

9) *Diseminasi Melalui Forum Seminar Nasional dan Internasional:*

Dosen pelaksana PkM didorong untuk mempresentasikan hasil pengabdianannya dalam forum seminar nasional atau internasional. Partisipasi dalam konferensi ini bertujuan untuk memperluas jejaring akademik dan mendapatkan masukan dari pakar lintas institusi mengenai model pemberdayaan masyarakat pesisir. Dokumentasi berupa sertifikat pemateri dan prosiding seminar menjadi bukti tambahan. Melalui forum ini, Program Studi BKI menunjukkan perannya sebagai aktor aktif dalam diskursus global mengenai literasi dan konservasi budaya maritim melalui lensa bahasa Inggris.

10) *Refleksi dan Tindak Lanjut Peningkatan Mutu (Peningkatan - P):*

Tahap diseminasi diakhiri dengan evaluasi dampak luaran terhadap profil program studi. Hasil pencapaian luaran (seperti jumlah sitasi artikel PkM atau jumlah unduhan modul digital) dibahas dalam Rapat Tinjauan Mutu (RTM). Jika sebuah luaran PkM mendapatkan pengakuan yang luas dari pemerintah daerah (seperti program di Dinas Pariwisata), maka UPPS akan memberikan dukungan pendanaan yang lebih besar pada siklus berikutnya untuk pengembangan program tersebut ke skala yang lebih luas. Konsistensi dalam memproduksi dan mendiseminasikan luaran berkualitas inilah yang menempatkan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris pada jalur keunggulan akademik yang bermartabat di wilayah Timur Sulawesi.

BAB IV

KODE ETIK PENGABDIAN

Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris menetapkan Kode Etik PkM sebagai kompas moral dan profesional dalam mewujudkan visi internasionalisasi kearifan lokal. Berikut adalah poin-poin utama kode etik yang wajib dipatuhi:

1. Integritas dan Martabat Institusional:

- PkM wajib dijalankan sebagai bentuk pengabdian yang tulus (*altruistik*), bukan sekadar pengguguran kewajiban administratif.
- Setiap pelaksana wajib menjaga nama baik Universitas Tompotika Luwuk melalui perilaku yang profesional, jujur, dan disiplin selama berada di lingkungan mitra.

2. Sensitivitas Budaya dan Penghormatan Kearifan Lokal (*Cultural Respect*):

- Wajib menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat, norma sosial, dan ritual kebudayaan masyarakat pesisir Banggai (misalnya dalam pendampingan di lokasi ritual *Malabot Tumbe*).
- Dilarang keras melakukan intervensi kebahasaan atau budaya yang bersifat merendahkan, mengubah, atau mengeksploitasi identitas lokal demi kepentingan konten publikasi semata.

3. Kejujuran Intelektual dan Orisinalitas Karya:

- Dilarang melakukan praktik fabrikasi data (memalsukan data kebutuhan masyarakat) atau falsifikasi hasil (manipulasi dampak pengabdian).
- Seluruh luaran PkM, termasuk 14 Buku ber-ISBN dan 8 HKI yang telah dicapai, wajib bebas dari plagiarisme dan wajib melewati uji kemiripan (*similarity check*) maksimal 25%.

4. Tanggung Jawab Ekologis dan Lingkungan Bahari:

- Pelaksana PkM di wilayah pesisir wajib menerapkan prinsip "*Leave No Trace*", yaitu tidak meninggalkan sampah dan tidak merusak ekosistem laut/pantai.
- PkM yang dilakukan di Taman Wisata Arboretum harus mendukung upaya konservasi flora dan fauna setempat sebagai bagian dari etika lingkungan akademik.

5. Profesionalisme dan Netralitas terhadap Mitra Strategis:

- Dalam kolaborasi dengan DUDI (seperti PT Donggi-Senoro LNG) dan Pemerintah Daerah, dosen wajib menjaga independensi akademik dan dilarang terlibat dalam politik praktis.
- Menolak segala bentuk gratifikasi atau pemberian dari mitra yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau mencederai objektivitas pengabdian.

6. Keadilan dan Inklusivitas Sosial:

- Menjamin bahwa program pengabdian (seperti *Fun English for Kids*) dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi suku, agama, gender, maupun status ekonomi.
- Memprioritaskan pemberdayaan kelompok rentan di wilayah pesisir guna mewujudkan dampak sosial yang merata dan berkelanjutan.

7. Etika Kepengarangan dan Pengakuan Kontribusi Mahasiswa:

- Wajib mencantumkan nama mahasiswa secara jujur sebagai penulis pendamping (*co-author*) jika mahasiswa berkontribusi aktif dalam penyusunan produk PkM.
- Menjamin hak mahasiswa untuk mendapatkan rekognisi portofolio akademik (SKPI) atas karya intelektual yang dihasilkan bersama dosen di lapangan.

8. Proteksi dan Keamanan Sivitas Akademika di Lapangan:

- Dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab penuh atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan (K3) mahasiswa selama menjalankan tugas di desa binaan yang terpencil.
- Menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk pelecehan seksual, perundungan (*bullying*), dan intimidasi dalam relasi dosen-mahasiswa di lokasi PkM.

9. Transparansi dan Akuntabilitas Finansial:

- Setiap rupiah penggunaan dana PkM (baik hibah internal, nasional, maupun kemitraan) wajib dilaporkan secara jujur sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.
- Dosen wajib mempertanggungjawabkan luaran pengabdian yang dijanjikan dalam kontrak hibah sebagai bentuk amanah penggunaan dana publik.

10. Pengawasan dan Penegakan Sanksi Etik:

- Kepatuhan kode etik dipantau secara sistematis oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Fakultas.
- Setiap pelanggaran terhadap poin-poin di atas akan dikenakan sanksi disiplin akademik, mulai dari teguran hingga pembatasan akses terhadap dana hibah tridharma di masa mendatang.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

5.1. Instrumen Evaluasi

1. Formulir Verifikasi Kelayakan Proposal (Pre-Implementation Instrument)

Instrumen ini digunakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tahap awal untuk menelaah kualitas akademik setiap usulan PkM. Poin-poin evaluasi di dalam formulir ini mencakup: (a) Kesejajaran tema dengan visi keunggulan wilayah pesisir; (b) Kualitas hilirisasi riset terapan dosen; (c) Kelayakan formasi tim yang melibatkan minimal 3 mahasiswa; serta (d) Rasionalitas rencana anggaran biaya (RAB). Instrumen ini memastikan bahwa hanya program pengabdian yang memiliki standar mutu tinggi yang mendapatkan izin pelaksanaan, sehingga sejak awal risiko kegagalan program telah dimitigasi secara sistematis.

2. Instrumen Logbook Harian dan Catatan Kemajuan Lapangan

Selama masa pelaksanaan di lapangan, dosen pelaksana dan mahasiswa wajib mengisi instrumen Logbook digital. Instrumen ini mencatat aktivitas harian secara mendetail, mulai dari jam pelaksanaan, metode pendampingan yang digunakan, hingga kendala teknis yang dihadapi di lokasi pengabdian (seperti tantangan akses di desa terpencil). Logbook ini bukan sekadar catatan kehadiran, melainkan instrumen kendali mutu yang memungkinkan pimpinan program studi melakukan monitoring secara jarak jauh melalui sistem informasi. Ketersediaan data dalam logbook ini menjadi bukti fisik utama bagi asesor untuk melihat konsistensi antara perencanaan dengan realitas aktivitas di lapangan.

3. Berita Acara Monitoring dan Supervisi Lapangan (Field Monitoring Form)

Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat fakultas melakukan kunjungan supervisi menggunakan instrumen Berita Acara Monitoring. Instrumen ini diisi oleh tim supervisor independen untuk memvalidasi kesesuaian implementasi di lapangan dengan standar kode etik dan K3 yang telah ditetapkan. Supervisor melakukan pemeriksaan silang terhadap keterlibatan aktif mahasiswa dan kualitas materi pengabdian (misalnya buku ajar *Coastal Conversation of Banggai*). Hasil dari instrumen ini memberikan gambaran objektif mengenai kepatuhan pelaksana terhadap prosedur operasional standar (SOP) PkM yang berlaku di Universitas Tompotka Luwuk.

4. Kuesioner Survei Kepuasan Stakeholder/Mitra (Indikator 34)

Ini adalah instrumen paling krusial dalam instrumen akreditasi 2025, karena mengukur dampak eksternal secara langsung. Kuesioner ini disebarkan kepada masyarakat mitra atau pimpinan instansi (seperti Dinas Pariwisata atau PT. Donggi Senoro LNG) setelah program berakhir. Aspek yang diukur meliputi: (a) Relevansi program dengan kebutuhan masyarakat pesisir; (b) Profesionalisme dosen dan mahasiswa; (c) Kemudahan akses informasi; serta (d) Manfaat jangka panjang program bagi mitra. Data dari instrumen ini diolah secara statistik untuk menghasilkan angka persentase kepuasan, di mana Program Studi BKI secara konsisten mencatatkan skor di atas 90%, yang membuktikan keberterimaan program pengabdian di mata masyarakat.

5. Instrumen Evaluasi Kinerja Mahasiswa dan Rekognisi SKS

Mengingat PkM diintegrasikan dengan kebijakan MBKM, prodi menyediakan instrumen penilaian kinerja mahasiswa. Instrumen ini diisi oleh dosen ketua pelaksana untuk menilai capaian kompetensi mahasiswa selama pengabdian, mencakup aspek kepemimpinan, komunikasi bilingual, dan empati sosial. Skor dalam instrumen ini kemudian dikonversi menjadi nilai akademik pada mata kuliah pendukung kurikulum. Dengan instrumen ini, ketersediaan data mengenai experiential learning mahasiswa menjadi sangat transparan dan akuntabel, menjamin bahwa setiap mahasiswa mendapatkan rekognisi yang adil atas kontribusi lapangan mereka.

6. Checklist Validasi Luaran dan Integritas Akademik

Instrumen ini digunakan untuk memverifikasi produk akhir yang dihasilkan dari kegiatan PkM. Setiap luaran, baik berupa buku ber-ISBN, modul, maupun draf HKI, wajib diperiksa kelengkapannya melalui checklist standar luaran. Salah satu komponen utama dalam instrumen ini adalah lampiran laporan hasil pengecekan Turnitin (Anti-Plagiasi). Instrumen ini menjamin bahwa 14 buku dan 8 HKI yang telah dicapai prodi benar-benar memenuhi standar orisinalitas ilmiah. Keberadaan instrumen ini melindungi institusi dari potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual dan memastikan integritas akademik tetap terjaga.

7. Formulir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dan Program

UPPS menyediakan templat standar LPJ yang harus diisi oleh setiap tim PkM. Instrumen ini mengevaluasi efisiensi penggunaan dana hibah (baik internal maupun eksternal) terhadap efektivitas program. Di dalam instrumen ini, dosen wajib melaporkan ketercapaian target IKU yang dijanjikan di awal proposal. Kerapian dan ketepatan waktu pengumpulan LPJ melalui instrumen ini menjadi salah satu parameter dalam penilaian

kinerja tahunan dosen yang terekam dalam sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian (BIMA).

8. Instrumen Survei Kepuasan Dosen terhadap Dukungan UPPS

Evaluasi tidak hanya dilakukan ke luar, tetapi juga ke dalam. Program studi menggunakan kuesioner internal untuk mengukur tingkat kepuasan dosen terhadap dukungan administratif, pendanaan, dan sarana prasarana yang disediakan UPPS untuk kegiatan PkM. Hasil evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dosen merasa didukung dalam melaksanakan tridharma, sehingga etos kerja riset dan pengabdian tetap terjaga pada level yang produktif dan inovatif.

9. Instrumen Penilaian Dampak Rekognisi dan Kemitraan

Untuk melacak keberhasilan jangka panjang, prodi menggunakan instrumen pemantauan rekognisi eksternal. Instrumen ini mendokumentasikan setiap undangan narasumber, sertifikat penghargaan, atau kontrak kerjasama baru yang lahir sebagai dampak langsung dari kegiatan PkM sebelumnya. Melalui instrumen ini, prodi dapat membuktikan adanya keberlanjutan (sustainability) kemitraan dengan industri besar atau pemerintah daerah, yang merupakan bukti nyata bahwa kepakaran dosen prodi BKI diakui dan dibutuhkan secara luas.

10. Berita Acara Rapat Tinjauan Mutu (RTM) - PkM Section

Instrumen terakhir adalah format notulensi dan rekomendasi Rapat Tinjauan Mutu. Instrumen ini digunakan untuk merangkum seluruh hasil evaluasi dari poin 1 hingga 9 menjadi dokumen rencana perbaikan. RTM merupakan jembatan menuju tahap Peningkatan (P) dalam siklus PPEPP. Di sini, setiap kelemahan instruksional atau administratif yang terdeteksi melalui instrumen evaluasi akan dirumuskan solusi dan tindak lanjutnya untuk semester berikutnya. Instrumen RTM ini menjamin bahwa sistem penjaminan mutu PkM di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris bersifat dinamis, selalu belajar dari data, dan berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan demi mencapai peringkat akreditasi Unggul.

5.2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan instrumen akuntabilitas untuk mengukur sejauh mana aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Studi. Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris (BKl) menetapkan bahwa penilaian kinerja tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan beban administratif, melainkan sebagai bentuk audit

profesional terhadap kualitas instruksional dan dampak sosial. Sistem penilaian kinerja ini diintegrasikan ke dalam siklus Evaluasi (E) pada mekanisme PPEPP, di mana hasil penilaian menjadi dasar bagi pemberian rekognisi, insentif, maupun perbaikan program di masa mendatang. Penilaian kinerja dilakukan secara komprehensif terhadap dua aktor utama, yaitu Dosen dan Mahasiswa, dengan parameter sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Dosen berbasis Beban Kerja Dosen (BKD)

Setiap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dievaluasi kinerjanya melalui sistem pelaporan BKD yang terintegrasi dengan aplikasi SISTER. Program studi menetapkan standar kinerja minimum PkM sebesar 2 SKS per semester. Penilaian kinerja dosen tidak hanya didasarkan pada kuantitas kegiatan, tetapi pada kualitas implementasi Research-led Community Service. Dosen dinilai tinggi jika mampu membuktikan bahwa PkM yang dilakukan adalah bentuk hilirisasi riset mengenai kearifan lokal pesisir. Bukti kinerja ini divalidasi oleh pimpinan UPPS melalui pemeriksaan Surat Tugas, laporan akhir, dan bukti luaran yang relevan, guna memastikan setiap dosen tetap produktif dalam koridor Tridharma yang bermutu.

2. Penilaian Kualitas dan Kebermanfaatan Luaran (Output Performance)

Parameter utama dalam penilaian kinerja dosen adalah produktivitas luaran yang terekognisi secara nasional. Program studi memberikan bobot nilai tertinggi pada luaran yang memiliki perlindungan hukum dan standar identitas nasional, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Buku Referensi ber-ISBN. Keberhasilan Program Studi BKI dalam menghasilkan 14 buku dan 8 HKI dalam tiga tahun terakhir merupakan hasil dari sistem penilaian kinerja yang memberikan penghargaan lebih kepada dosen yang mampu mentransformasikan aktivitas lapangan menjadi produk intelektual. Penilaian ini juga mencakup publikasi di jurnal pengabdian masyarakat (SINTA), di mana konsistensi publikasi menjadi indikator kepakaran dosen di mata kolega sejawat dan institusi.

3. Penilaian Dampak melalui Rekognisi Eksternal (Impact Performance)

Kinerja dosen juga diukur dari sejauh mana kepakarannya diakui oleh pihak luar sebagai dampak dari kegiatan PkM yang dilakukan. Penilaian ini merujuk pada data [LKPS Tabel 1-II.4: Rekognisi DPRPS]. Dosen dinilai memiliki kinerja unggul jika mendapatkan undangan sebagai narasumber, tenaga ahli pemerintah daerah, atau konsultan industri (seperti pada kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan LNG). Rekognisi ini membuktikan bahwa PkM yang dilakukan dosen Program Studi BKI bukan sekadar aktivitas internal, melainkan solusi nyata yang dibutuhkan oleh

stakeholder di wilayah Kabupaten Banggai. Dokumentasi sertifikat dan surat ucapan terima kasih dari mitra menjadi bukti fisik yang sah dalam penilaian kinerja ini.

4. Penilaian Capaian Kompetensi Mahasiswa (MBKM Performance)

Sejalan dengan misi pendidikan, penilaian kinerja mahasiswa dalam PkM dilakukan untuk mengukur keberhasilan experiential learning. Dosen pembimbing lapangan melakukan penilaian objektif menggunakan Instrumen Rubrik Penilaian Mahasiswa yang mencakup aspek kemahiran komunikasi bilingual, kepemimpinan, dan empati sosial. Nilai kinerja ini sangat krusial karena akan dikonversi menjadi angka akademik yang sah di dalam sistem SIAKAD/e-Campuz. Penilaian yang detail memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya sekadar membantu teknis di lapangan, tetapi benar-benar mengalami transformasi intelektual yang selaras dengan profil lulusan sebagai praktisi bahasa yang memiliki kepekaan budaya pesisir.

5. Penilaian Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Prosedur K3

Integritas lapangan menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian kinerja. Tim PkM dinilai kinerjanya berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik PkM dan standar keselamatan kerja (K3). Penilaian ini dilakukan melalui observasi lapangan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan pengisian instrumen evaluasi diri oleh anggota tim. Pelaksana yang mampu menjalankan pengabdian tanpa adanya deviasi etik serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir (seperti di Taman Wisata Arboretum) akan mendapatkan predikat kinerja Sangat Baik. Hal ini penting untuk menjaga citra Program Studi BKI sebagai institusi yang menjunjung tinggi moralitas dan kearifan lokal.

6. Analisis Indeks Kepuasan Mitra sebagai Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan sebuah program PkM diukur secara kuantitatif melalui survei kepuasan stakeholder. Skor rata-rata kepuasan mitra yang mencapai di atas 90% merupakan indikator kinerja kolektif program studi yang membanggakan. Penilaian kinerja berbasis kepuasan mitra ini memberikan gambaran jujur mengenai relevansi program pengabdian dengan kebutuhan riil masyarakat desa pesisir. Jika hasil survei menunjukkan nilai di bawah target, maka kinerja tim PkM tersebut dianggap perlu dievaluasi dan mendapatkan tindakan pengendalian dalam Rapat Tinjauan Mutu (RTM).

7. Penilaian Sinergi Tim dan Manajemen Kolaborasi

Program studi menilai kinerja pelaksana berdasarkan kemampuan mereka dalam membangun kerjasama tim yang harmonis. Kolaborasi lintas jabatan fungsional

(Lektor dan Asisten Ahli) serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam satu proyek PkM dinilai sebagai performa organisasi yang sehat. Penilaian ini mendokumentasikan bagaimana transfer pengetahuan (knowledge sharing) terjadi di lapangan. Tim yang solid dan mampu menjalin kemitraan strategis yang berkelanjutan (terbukti dengan adanya perpanjangan MoA dengan mitra) dinilai memiliki kinerja manajemen pengabdian yang sangat efektif.

8. Audit Akuntabilitas Finansial dan Efisiensi Anggaran

Penilaian kinerja juga menyentuh aspek administratif-finansial. Setiap tim PkM dinilai berdasarkan ketepatan waktu dan akurasi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Efisiensi penggunaan dana hibah internal maupun eksternal terhadap kualitas luaran yang dihasilkan menjadi parameter penilaian yang ketat. Auditor internal (SPI) universitas memberikan penilaian terhadap kepatuhan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disetujui dalam proposal. Ketertiban finansial ini mencerminkan kinerja manajerial dosen yang profesional dan akuntabel dalam mengelola dana publik.

9. Penilaian Kontribusi PkM terhadap Pemutakhiran Kurikulum

Puncak dari penilaian kinerja PkM adalah sejauh mana hasil pengabdian tersebut terintegrasi ke dalam proses pembelajaran (Research-led Teaching). Dosen dinilai berkinerja luar biasa jika mampu membuktikan bahwa modul atau studi kasus yang dihasilkan dari lapangan (seperti buku Coastal Conversation of Banggai) telah digunakan sebagai materi ajar dalam mata kuliah keahlian. Penilaian integrasi ini dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen RPS terbaru.

10. Mekanisme Rekognisi dan Tindak Lanjut Peningkatan (PPEPP)

Hasil dari seluruh rangkaian penilaian kinerja di atas dipaparkan secara transparan dalam forum tahunan Fakultas. Dosen dengan skor kinerja tertinggi akan diberikan piagam penghargaan dan insentif publikasi sebagai bentuk Peningkatan (P) kualitas SDM. Sebaliknya, bagi pelaksana dengan nilai kinerja yang rendah, program studi akan memberikan pendampingan teknis melalui workshop penyusunan proposal atau penulisan buku. Dengan sistem penilaian kinerja yang detail dan berbasis data ini, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris memastikan bahwa Budaya Mutu senantiasa terjaga, memacu semangat inovasi dosen, dan menjamin keberlanjutan program pengabdian yang berdampak luas bagi kemajuan masyarakat pesisir di Indonesia Timur.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN

6.1. Pengendalian

Mekanisme pengendalian dalam siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris (BKI) merupakan tahapan sistemis yang bertujuan untuk mendeteksi, mengoreksi, dan memitigasi setiap deviasi atau ketidaksesuaian antara standar yang telah ditetapkan (Penetapan) dengan realitas pencapaian di lapangan (Pelaksanaan). Pengendalian di PS BKI tidak dipandang sebagai tindakan administratif yang kaku, melainkan sebagai fungsi manajemen yang suportif untuk menjamin keberlanjutan mutu instruksional dan riset. Berdasarkan hasil Evaluasi (E) yang dilakukan secara periodik, program studi melakukan tindakan pengendalian yang bersifat responsif dan berbasis data (*data-driven control*), guna memastikan setiap program PkM tetap berada pada jalur visi keunggulan wilayah pesisir dan laut tanpa mengorbankan integritas akademik.

Forum tertinggi dalam mekanisme pengendalian di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Rapat Tinjauan Mutu (RTM). Notulensi RTM menjadi dokumen legal yang merangkum instruksi pengendalian dari pimpinan fakultas kepada ketua pelaksana PkM. Dalam rapat ini, pimpinan UPPS membedah hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan survei kepuasan stakeholder untuk mengidentifikasi akar masalah jika ditemukan standar PkM yang belum tercapai. Sebagai contoh, jika terdapat tim PkM yang gagal menghasilkan luaran wajib berupa HKI atau buku ber-ISBN, maka RTM akan menerbitkan surat peringatan akademik dan rekomendasi teknis agar tim tersebut melakukan pendampingan intensif pada semester berikutnya. Prosedur tutup siklus (*closing the loop*) ini menjamin bahwa setiap masalah yang ditemukan dalam tahap evaluasi segera mendapatkan solusi yang konkret dan terukur.

Salah satu fokus pengendalian utama di PS BKI adalah Pengendalian Relevansi Tema berbasis Riset. Mengingat misi prodi adalah hilirisasi riset pesisir, pimpinan prodi melakukan kontrol ketat terhadap penyimpangan misi (*mission drift*). Jika hasil monitoring menunjukkan bahwa sebuah program pengabdian mulai kehilangan keterkaitannya dengan data riset awal atau keluar dari peta jalan wilayah pesisir, maka Unit Penjaminan Mutu (UPM) akan menginstruksikan pelaksana untuk melakukan re-orientasi program. Pengendalian ini dilakukan melalui revisi terhadap modul pelatihan

atau metode pendampingan di lapangan, guna memastikan bahwa Program Studi BKI tetap konsisten sebagai pusat rujukan literasi maritim yang autentik dan saintifik.

Dalam aspek Produktivitas Luaran, program studi menerapkan sistem pengendalian berupa ambang batas minimal performansi. Keberhasilan mencapai 14 buku ber-ISBN dan 8 HKI merupakan hasil dari pengendalian yang disiplin, di mana setiap dosen yang memiliki beban EWMP PkM wajib melaporkan progres draf karya tulisnya secara berkala. Jika ditemukan kendala dalam proses penulisan atau pendaftaran HKI, prodi akan mengintervensi dengan menyediakan tim pendamping penulisan (*writing buddy*) dari kalangan dosen senior. Tindakan pengendalian ini bertujuan untuk menjamin bahwa aset intelektual prodi terus bertumbuh secara linear dan setiap sen investasi dana hibah universitas terkonversi menjadi luaran yang tervalidasi secara hukum.

Pengendalian terhadap Dampak dan Kepuasan Stakeholder dilakukan dengan mengacu pada ambang batas skor minimal 3,00 (skala 4,00) pada setiap unsur penilaian. Apabila terdapat unsur layanan yang mendapatkan predikat Cukup atau Kurang, prodi wajib melakukan audit investigasi singkat. Sebagai contoh, jika masyarakat mitra mengeluhkan kompleksitas bahasa dalam modul *English for Kids*, maka prodi akan memerintahkan tim pelaksana untuk segera melakukan penyederhanaan materi instruksional. Pengendalian berbasis respon cepat ini krusial untuk memelihara kepercayaan masyarakat pesisir terhadap Program Studi BKI, sehingga kemitraan strategis jangka panjang tetap terjaga.

Dalam aspek Pendidikan Mahasiswa (MBKM), pengendalian dilakukan untuk menjamin kualitas *experiential learning*. Dosen pembimbing lapangan (DPL) secara rutin memeriksa ketertiban mahasiswa dalam mengisi logbook harian. Jika ditemukan mahasiswa yang tidak mencapai target aktivitas lapangan, maka DPL wajib memberikan teguran dan penugasan tambahan guna memastikan kompetensi mahasiswa sesuai dengan target CPL. Pengendalian ini memastikan bahwa pengakuan SKS yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan representasi jujur dari transformasi kemampuan mahasiswa selama berada di lokasi pengabdian, sehingga mutu lulusan angkatan pertama (2023) nantinya tetap kompetitif.

Integritas Akademik dan Etika menjadi area pengendalian yang bersifat Zero Tolerance. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan pengendalian represif terhadap setiap indikasi pelanggaran kode etik, seperti praktik plagiarisme dalam penyusunan buku PkM atau perilaku tidak santun terhadap tokoh adat di wilayah pesisir. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) akan

melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bukti secara formal. Tindakan pengendalian berupa pembatalan sertifikat pengabdian atau penghentian pendanaan dapat dilakukan untuk melindungi reputasi program studi. Ketegasan dalam pengendalian etik ini merupakan bukti nyata bahwa PS BKI menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas di atas pencapaian kuantitatif.

Pengendalian di bidang Sarana dan Keamanan (K3L) dilakukan untuk memitigasi risiko fisik selama pengabdian di desa-desa terpencil atau wilayah pantai. Berdasarkan laporan kendala lapangan dalam logbook, prodi dapat melakukan intervensi berupa penyediaan fasilitas pendukung tambahan atau perubahan protokol transportasi bagi tim PkM. Jika sebuah lokasi pengabdian dinilai memiliki risiko keamanan yang tinggi berdasarkan evaluasi berkala, pimpinan prodi memiliki otoritas untuk mengalihkan sementara lokasi pengabdian ke desa mitra lain yang lebih aman. Kontrol terhadap keselamatan sivitas akademika ini merupakan prioritas manajemen guna memastikan proses tridharma berjalan lancar tanpa adanya hambatan fisik yang berarti.

Aspek Akuntabilitas Finansial dikendalikan melalui verifikasi bertahap terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan. Auditor internal universitas (SPI) bertindak sebagai instrumen pengendali yang memastikan tidak terjadi mal-administrasi penggunaan dana. Jika ditemukan penggunaan anggaran yang tidak efisien atau tidak sesuai peruntukan, tim PkM diwajibkan melakukan revisi laporan atau pengembalian sisa dana ke kas universitas. Pengendalian finansial yang ketat ini menjamin bahwa setiap program pengabdian dijalankan dengan prinsip efektivitas biaya (cost-effectiveness), sehingga sumber daya universitas dapat digunakan secara optimal untuk pengembangan mutu program studi di masa depan.

Terakhir, seluruh rangkaian tindakan pengendalian di atas didokumentasikan ke dalam Laporan Tindak Lanjut Pengendalian Mutu PkM. Dokumen ini menjadi bukti fisik yang sangat berharga bagi asesor akreditasi untuk melihat keterlaksanaan siklus PPEPP secara utuh di PS BKI. Keberfungsian mekanisme pengendalian ini membuktikan bahwa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris UNTIKA Luwuk adalah institusi yang adaptif, memiliki kontrol diri yang kuat, dan senantiasa berkomitmen pada perbaikan mutu berkelanjutan. Dengan sistem pengendalian yang mapan, prodi menjamin bahwa setiap aktivitas pengabdian masyarakat selalu memberikan dampak positif yang kredibel bagi pembangunan wilayah pesisir Banggai secara keseluruhan.

6.2. Peningkatan

Tahap peningkatan dalam siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris (BKI) merupakan perwujudan dari komitmen institusi untuk tidak sekadar memenuhi standar minimal, melainkan terus mengupayakan eskalasi kualitas secara berkelanjutan. Peningkatan mutu di PS BKI didasarkan pada filosofi bahwa setiap keberhasilan yang telah dicapai pada siklus sebelumnya harus dijadikan sebagai batu pijakan (baseline) untuk menetapkan standar yang lebih tinggi pada periode berikutnya. Melalui hasil Evaluasi dan Pengendalian yang telah dilakukan, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merumuskan strategi peningkatan yang berfokus pada penguatan rekognisi internasional, perluasan dampak sosial di wilayah pesisir, serta inovasi luaran yang lebih kompetitif.

Salah satu langkah peningkatan strategis yang dilakukan adalah Eskalasi Standar Luaran PkM. Jika pada fase awal pendirian prodi (2023-2025) fokus utama luaran adalah pada penerbitan buku ber-ISBN dan HKI tingkat nasional, maka pada siklus peningkatan berikutnya, prodi menetapkan standar baru yang mewajibkan adanya publikasi hasil pengabdian pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi SINTA2. Keberhasilan menghasilkan 14 buku referensi kini ditingkatkan targetnya menjadi produksi naskah monograf yang memiliki nilai sitasi tinggi di tingkat global. Peningkatan standar luaran ini bertujuan untuk memperkuat posisi Program Studi BKI sebagai pusat keunggulan literasi pesisir yang diakui tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga dalam diskursus akademik internasional.

Dalam aspek Diferensiasi Misi, program studi melakukan peningkatan melalui Pendalaman Peta Jalan (Roadmap) PkM. Berdasarkan hasil refleksi terhadap kegiatan di Taman Wisata Arboretum dan Desa Bumi Harapan, prodi melakukan pemutakhiran Roadmap PkM 2026-2030 dengan memasukkan variabel Internasionalisasi Budaya Pesisir. Peningkatan ini diwujudkan dengan merancang program pengabdian yang memfasilitasi komunikasi bilingual bagi masyarakat pesisir dalam menghadapi arus wisatawan mancanegara yang lebih masif. Penajaman misi ini memastikan bahwa setiap gerak pengabdian prodi BKI selalu bersifat mutakhir dan adaptif terhadap perubahan dinamika sosiopolitik dan industri di wilayah Timur Sulawesi.

Peningkatan mutu juga dilakukan pada aspek Kemitraan Strategis dan Jejaring Eksternal. Program studi berupaya meningkatkan skala kerjasama dari tingkat lokal/daerah menuju kemitraan berskala nasional dan internasional. Jika sebelumnya kerjasama terbatas pada pemerintah desa dan dinas kabupaten, maka pada siklus peningkatan ini, UPPS secara

proaktif menjalin komunikasi dengan lembaga donor internasional dan NGO lingkungan yang memiliki perhatian pada wilayah pesisir (Marine Conservation). Peningkatan kualitas kemitraan ini diharapkan dapat membuka akses pendanaan eksternal yang lebih besar, sehingga program pengabdian masyarakat di PS BKI memiliki daya dukung finansial yang kuat dan keberlanjutan yang terjamin.

Pada aspek Pendidikan dan Integrasi kurikulum (MBKM), prodi melakukan peningkatan mutu melalui sistem Rekognisi Kompetensi Mahasiswa yang lebih Komprehensif. Peningkatan ini diwujudkan dengan pengembangan portofolio mahasiswa yang lebih detail, di mana keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen tidak hanya dikonversi menjadi nilai SKS, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan produk kewirausahaan bahasa (Englishpreneurship). Program studi mulai menginkubasi produk-produk digital hasil PkM mahasiswa untuk dikelola menjadi unit usaha mandiri, sehingga PkM memberikan dampak ganda: pemberdayaan masyarakat sekaligus penyiapan kemandirian ekonomi lulusan sebelum mereka menyelesaikan studi.

Inovasi Teknologi (TIK) dalam PkM juga mengalami eskalasi yang signifikan. Dari penggunaan Barcode Digital sederhana, program studi kini bergerak menuju pengembangan Aplikasi Interaktif Literasi Pesisir yang mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu wisatawan memahami kearifan lokal Banggai. Peningkatan sarana digital ini didukung oleh alokasi anggaran investasi SDM dari UPPS untuk pelatihan dosen di bidang Digital Humanities. Transformasi teknologi ini membuktikan bahwa PS BKI senantiasa berada di garda terdepan dalam mengadopsi inovasi Industri 4.0 untuk memuliakan budaya lokal pesisir.

UPPS juga melakukan peningkatan pada Sistem Insentif dan Rekognisi Dosen. Sebagai bentuk apresiasi terhadap produktivitas luaran yang tinggi, universitas meningkatkan plafon dana bantuan pendaftaran HKI dan memberikan "Hibah Pengabdian Unggulan" bagi tim yang mampu membuktikan adanya dampak ekonomi langsung pada masyarakat mitra. Peningkatan sistem penghargaan ini bertujuan untuk memacu etos kerja dosen agar terus melakukan inovasi pengabdian yang melampaui tugas rutin. Dengan motivasi yang tinggi, diharapkan dosen tetap prodi BKI dapat terus mempertahankan rasio luaran yang melampaui standar nasional secara konsisten.

Dalam hal Integritas Akademik, peningkatan mutu dilakukan melalui penguatan Standardisasi Review Luaran. Program studi membentuk tim Peer-Reviewer lintas kampus untuk menilai kualitas buku dan modul pengabdian sebelum diterbitkan. Peningkatan kualitas kontrol ini menjamin bahwa setiap produk intelektual yang membawa nama

Program Studi BKI UNTIKA Luwuk memiliki validitas isi yang diakui oleh komunitas akademik luas. Langkah ini krusial untuk membangun reputasi program studi sebagai institusi pendidikan yang berwibawa dan menjunjung tinggi standar kualitas ilmiah yang ketat.

Peningkatan juga menyentuh aspek Akuntabilitas Finansial dan Tata Kelola. UPPS mengimplementasikan sistem audit kinerja PkM yang berbasis pada Impact Assessment (Penilaian Dampak). Peningkatan ini berarti penilaian keberhasilan program tidak lagi hanya berhenti pada terserapnya anggaran, tetapi pada sejauh mana indikator kesejahteraan masyarakat mitra meningkat pasca-pengabdian. Dengan menggunakan instrumen penilaian dampak yang lebih saintifik, program studi dapat menyajikan data pertanggungjawaban yang lebih meyakinkan kepada pemberi hibah dan asesor akreditasi mengenai efektivitas penggunaan dana tridharma.

Sebagai kesimpulan, seluruh upaya peningkatan mutu di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris senantiasa bermuara pada pencapaian status Terakreditasi Unggul. Siklus peningkatan yang progresif ini membuktikan bahwa Budaya Mutu telah mendarah daging dalam sistem tata kelola kami. Dengan terus menaikkan standar pada setiap aspek, mulai dari kualifikasi pelaksana, relevansi tema, hingga produktivitas luaran, PS BKI optimis dapat menjadi mercusuar pendidikan dan pengabdian masyarakat di wilayah kepulauan, yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan literasi dan martabat bangsa di tingkat internasional.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris (BKI) merupakan perwujudan konkret dari tata kelola perguruan tinggi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dokumen ini bukan sekadar kumpulan aturan administratif, melainkan instrumen strategis yang dirancang untuk mengawal setiap gerak intelektual sivitas akademika dalam menjalankan amanah Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan adanya pedoman yang sistematis ini, Program Studi BKI memastikan bahwa setiap aktivitas pengabdian masyarakat memiliki standar mutu yang terjaga, mulai dari tahap perencanaan yang berbasis kebutuhan riil, hingga tahap diseminasi luaran yang terekognisi secara nasional maupun internasional.

Keberadaan pedoman ini menjadi jembatan krusial dalam mewujudkan Diferensiasi Misi program studi yang berfokus pada bidang Penelitian. Melalui mekanisme Research-led Community Service yang diatur di dalam pedoman ini, Program Studi BKI berkomitmen untuk melakukan hilirisasi ilmu pengetahuan secara jujur dan aplikatif. Fokus keunggulan pada wilayah pesisir dan laut bukan lagi sekadar slogan, melainkan telah menjadi ruh yang menjiwai setiap program pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan produktivitas luaran berupa 14 buku ber-ISBN dan 8 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dicapai, yang sekaligus menjadi bukti otentik bahwa integrasi antara riset dan pengabdian mampu melahirkan inovasi yang bermanfaat luas bagi pembangunan Kabupaten Banggai dan sekitarnya.

Penjaminan mutu yang tertuang dalam pedoman ini, khususnya melalui implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), menjamin bahwa aktivitas PkM bersifat dinamis dan selalu berkembang. Program studi menyadari bahwa tantangan di era Industri 4.0 menuntut adaptabilitas tinggi, sehingga pedoman ini juga mengintegrasikan penguatan teknologi informasi dan literasi digital dalam setiap skema pengabdian. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, setiap deviasi yang ditemukan di lapangan segera dijadikan bahan refleksi untuk peningkatan standar mutu di masa depan, guna menjamin kepuasan stakeholder tetap berada pada kategori sangat baik.

Lebih dari itu, pedoman ini dirancang untuk mendidik mahasiswa angkatan pertama dan generasi selanjutnya agar memiliki karakter intelektual yang bermartabat. Melalui keterlibatan aktif dalam PkM yang terstruktur, mahasiswa mendapatkan ruang belajar yang otentik untuk mengasah empati sosial dan kemahiran komunikasi bilingual mereka.

Pengalaman lapangan ini menjadi investasi berharga bagi portofolio lulusan, sehingga mereka tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh dalam memecahkan persoalan nyata di masyarakat. Integrasi pengabdian ke dalam kurikulum MBKM membuktikan bahwa Program Studi BKI sangat serius dalam menyiapkan SDM yang siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Sebagai penutup, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk optimis bahwa implementasi pedoman ini secara konsisten akan menghantarkan institusi mencapai peringkat Akreditasi Unggul. Kami meyakini bahwa dengan menjunjung tinggi etika akademik dan kearifan lokal pesisir, Program Studi BKI akan terus tumbuh menjadi pusat rujukan literasi dan kebudayaan Inggris yang inovatif di wilayah Indonesia Timur. Semoga pedoman ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi oleh seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya visi universitas yang bermartabat dan berdaya saing global.

LAMPIRAN

1. TEMPLATE LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1) Halaman Sampul



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

JUDUL PROGRAM PkM:

[Contoh: Pelatihan Digital Storytelling Budaya Pesisir bagi Kelompok Sadar Wisata di
Desa Bumi Harapan]

KLASTER UNGGULAN:

[English for Coastal Development / Digital Literacy / Culturally Responsive Teaching]

TIM PELAKSANA:

Ketua: [Nama Dosen - NIDN]

Anggota Dosen: [Nama Dosen - NIDN]

Anggota Mahasiswa: [Nama Mahasiswa - NIM]

Anggota Mahasiswa: [Nama Mahasiswa - NIM]

Anggota Mahasiswa: [Nama Mahasiswa - NIM]

PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIIS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

TAHUN

2) Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN	
Judul Program PkM :	
Klaster Unggulan PkM : ☐ English for Coastal Development ☐ Digital Literacy & Local Heritage Promotion ☐ Culturally Responsive Teaching & Literacy	
Ketua Pelaksana	
a. Nama & Gelar	:
b. NIDN	:
c. Jabatan Fungsional	:
d. Program Studi	: Bahasa dan Kebudayaan Inggris
Anggota Tim Dosen :	
1.	(NIDN:)
2.	(NIDN:)
Anggota Mahasiswa :	
1.	(NIM:)
2.	(NIM:)
3.	(NIM:)
Masyarakat Mitra/Lokasi :	
Judul Penelitian Dasar :	
Target Luaran Nyata : ☐ Buku Referensi/Panduan Ber-ISBN ☐ Sertifikat HKI (Hak Cipta) ☐ Artikel Jurnal SINTA ☐ Media Digital/Aplikasi/Video Edukasi	
Sumber Pendanaan : ☐ Hibah Internal ☐ Hibah Nasional ☐ Mandiri	
Total Biaya : Rp	
Luwuk, ...	
Mengetahui, Ketua Prodi (Tanda tangan & Cap Basah) NIDN.	Ketua Peneliti NIDN.
Menyetujui, Dekan FKIP / Ketua LPPM Universitas Tompotika Luwuk (Tandatangan & Cap Basah) (Nama Lengkap Pejabat) NIDN.	

RINGKASAN

[Tuliskan ringkasan kegiatan maksimal 300 kata yang mencakup: Permasalahan mitra, solusi yang diberikan, keterkaitan dengan riset dosen, jumlah mahasiswa yang terlibat, serta luaran nyata yang dicapai (HKI/Buku/Publikasi).]

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi (Latar Belakang)

[Jelaskan kondisi riil masyarakat mitra di wilayah pesisir. Masalah komunikasi bahasa Inggris atau literasi digital apa yang ditemukan?]

1.2. Permasalahan Mitra

[Rumuskan secara spesifik masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui kepakaran keilmuan prodi BKI.]

1.3. Solusi yang Ditawarkan

[Jelaskan program yang diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut.]

1.4. Keterkaitan dengan Hasil Penelitian (Hilirisasi Riset)

[Sebutkan judul penelitian dosen yang menjadi dasar kegiatan PkM ini. Jelaskan bagaimana temuan riset tersebut diaplikasikan dalam pengabdian ini.]

BAB II: SASARAN DAN LOKASI

2.1. Profil Masyarakat Mitra

[Deskripsikan mitra secara detail (Pemerintah Desa, Pokdarwis, Guru, atau Pelaku Industri).]

2.2. Lokasi Kegiatan

[Cantumkan koordinat atau deskripsi wilayah pesisir yang menjadi lokus pengabdian.]

BAB III: METODE PELAKSANAAN

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

[Jelaskan alur kerja dari persiapan hingga evaluasi.]

3.2. Metode Pendampingan

[Tuliskan metode yang digunakan: Workshop, FGD, Mentoring, atau Demonstrasi Alat Digital.]

3.3. Peran dan Kontribusi Mahasiswa (Rekognisi MBKM)

[Jelaskan tugas spesifik mahasiswa di lapangan dan kaitannya dengan kompetensi mata kuliah yang dikonversi.]

BAB IV: HASIL DAN KETERCAPAIAN TARGET

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

[Uraikan jalannya kegiatan lapangan secara kronologis, sertakan deskripsi interaksi dengan warga.]

4.2. Ketercapaian Indikator Kinerja

[Bandingkan antara rencana awal dengan realisasi di lapangan.]

4.3. Luaran Intelektual (Output)

- a) **Buku ber-ISBN:** *[Tuliskan Judul Buku dan Nomor ISBN]*
- b) **HKI:** *[Tuliskan Judul Karya dan Nomor Sertifikat Hak Cipta]*
- c) **Publikasi:** *[Tuliskan Nama Jurnal SINTA dan status (Submit/Accepted/Published)]*

BAB V: MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

5.1. Analisis Kepuasan Mitra

[Sajikan data persentase dari kuesioner kepuasan masyarakat terhadap program ini.]

5.2. Kendala dan Solusi Pengendalian

[Tuliskan kendala yang dihadapi di lapangan dan bagaimana tim melakukan tindakan pengendalian/koreksi.]

BAB VI: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

[Ringkasan dampak positif bagi masyarakat pesisir.]

6.2. Rekomendasi Keberlanjutan

[Saran untuk UPPS/Universitas agar program ini tetap berjalan secara long-term di desa binaan.]

LAMPIRAN (DOKUMEN BUKTI SAH)

1. **Daftar Hadir Pelaksana dan Mitra** (Tandatangan & Cap Basah).
2. **Surat Tugas PkM.**
3. **Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Mitra (MoA/IA).**
4. **Logbook Harian Mahasiswa.**
5. **Dokumentasi Foto & Video** (Foto aktivitas utama bersama warga).
6. **Bukti Luaran:** *[Snapshot kover buku, sertifikat HKI, atau Letter of Acceptance (LoA) Jurnal].*
7. **Laporan Hasil Uji Plagiasi (Turnitin).**

2. INSTRUMEN PENILAIAN

INSTRUMEN 1: FORMULIR VERIFIKASI KELAYAKAN PROPOSAL PkM

(Digunakan oleh UPM untuk menyeleksi proposal dosen sebelum disetujui)

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor (1-5)	Catatan Reviewer
1	Relevansi Visi: Kesesuaian tema dengan Roadmap "Pesisir dan Laut"	25%		
2	Hilirisasi Riset: Kaitan program dengan hasil penelitian terdahulu	25%		
3	Keterlibatan Mahasiswa: Adanya minimal 3 mahasiswa & kejelasan tugasnya	20%		
4	Metodologi: Ketepatan metode pendampingan (PAR/ABCD/Digital)	15%		
5	Target Luaran: Kelayakan luaran (Jurnal SINTA/HKI/Buku ISBN)	15%		
Total Score		100%		

INSTRUMEN 2: SURVEI KEPUASAN MITRA

(Diisi oleh perwakilan masyarakat/instansi mitra di wilayah pesisir)

Skala Penilaian: 4 (Sangat Puas), 3 (Puas), 2 (Cukup), 1 (Kurang)

No	Unsur Penilaian Layanan PkM	4	3	2	1
1	Kesesuaian Program: Sejauh mana program menjawab kebutuhan masyarakat				
2	Kepakaran Dosen: Kemampuan dosen dalam menyampaikan materi bahasa/budaya				
3	Peran Mahasiswa: Kesantunan dan keaktifan mahasiswa dalam membantu warga				
4	Kualitas Materi: Kemudahan memahami modul/buku panduan yang diberikan				
5	Sarana Pendukung: Kualitas media digital/TIK yang digunakan (jika ada)				
6	Dampak: Manfaat nyata yang dirasakan (misal: kemahiran komunikasi)				
7	Keberlanjutan: Keinginan mitra untuk bekerjasama kembali di masa depan				

INSTRUMEN 3: RUBRIK PENILAIAN KINERJA MAHASISWA*(Diisi oleh Dosen Ketua PkM untuk penilaian SKS mahasiswa)*

Aspek Penilaian	Indikator Kinerja	Skor (1-100)
Hard Skills	Kemampuan mengaplikasikan teori Bahasa Inggris di lapangan	
Soft Skills	Kepemimpinan, kerjasama tim, dan kemampuan komunikasi	
Integritas	Kedisiplinan pengisian logbook dan kepatuhan kode etik	
Empati Sosial	Sensitivitas terhadap norma budaya masyarakat pesisir	
Luaran	Kontribusi dalam penyusunan draf buku/artikel PkM	

INSTRUMEN 4: CHECKLIST VALIDASI LUARAN PkM*(Digunakan untuk memverifikasi luaran sebelum dilaporkan)*

No	Jenis Luaran	Status (Ada/Tidak)	Kelengkapan Dokumen
1	Artikel Jurnal	[]	Link OJS & Bukti LOA/Terbit
2	Buku ber-ISBN	[]	Scan Halaman Judul & ISBN
3	HKI (Hak Cipta)	[]	Sertifikat dari DJKI
4	Media Digital	[]	Tautan YouTube/Website/Barcode
5	Uji Plagiasi	[]	Laporan Turnitin (Max 25%)

INSTRUMEN 5: FORMAT LOGBOOK HARIAN

(Diisi oleh tim PkM)

- *Tanggal Kegiatan:*
- *Waktu (Jam):*
- *Lokasi (Desa/Kec):*
- *Aktivitas Utama: (Misal: Melatih pemandu wisata di Arboretum)*
- *Jumlah Peserta:*
- *Data Lapangan Terkumpul: (Misal: Rekaman audio tradisi lisan)*
- *Kendala Lapangan:*
- *Dokumentasi: (Upload Foto/Link Cloud)*